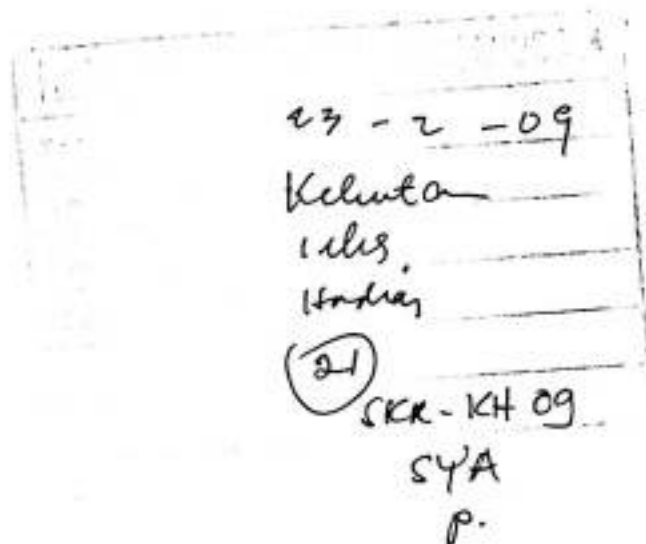


**PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN  
DI DESA MATTIROTASI KECAMATAN WATTANGPULU  
KABUPATEN SIDRAP PROVINSI SULAWESI SELATAN  
(Studi Kasus Kelompok Tani Sipakainge Dan Sipatuodeceng)**

**OLEH**

**IRA SYAHRIANI R  
M 111 04 003**



**FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : **PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN  
DI DESA MATTIROTASI KECAMATAN WATTANGPULU  
KABUPATEN SIDRAP PROVINSI SULAWESI SELATAN  
( STUDI KASUS KELOMPOK TANI SIPAKAINGE DAN  
SIPATUODECENG)**

**Nama Mahasiswa** : **IRA SYAHRIANI R**

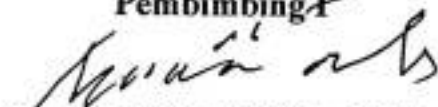
**Stambuk** : **M 111 04 003**

**Program Studi** : **MANAJEMEN HUTAN**

**Skripsi ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan Pada  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin**

**Menyetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

  
**H. Abdul Raszyd Kalu, MS**  
**Tanggal:**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Ir. H. Mas'ud Junus, M.Sc**  
**Tanggal :**



**Mengetahui,  
Panitia Ujian Sarjana Lengkap  
Program Studi Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan**

  
**H. Budirman Bachtiar, MS**  
**Tanggal :**

## ABSTRAK

**Ira Syahrani R ( M 111 04 003), Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Mattirotasi, Kecamatan Wattangpulu, Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan dibawah bimbingan Ir.Abdul Rasyid Kalu, MS dan Dr.Ir.H.Mas'ud Junus, M.Sc**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan mengetahui hasil Hutan Kemasyarakatan. Pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak Oktober hingga Desember 2008. Lokasi penelitian ini adalah Desa Mattirotasi , Kecamatan Wattangpulu, Kabupaten Sidrap.

Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara dengan Kelompok tani Rimba harapan (Sipakainge dan Sipatuodeceng) yang menggunakan daftar pertanyaan, sebanyak 53 orang responden program OECF dan BPDAS serta 26 orang program Swadaya Masyarakat. Data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi terkait, buku-buku serta laporan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif Kualitatif terhadap Kelembagaan kelompok tani meliputi struktur, aturan, intensitas pertemuan, dan sanksi. Mendeskripsikan akses lahan pengelolaan masing-masing program. Mengetahui persentase tumbuh tanaman dengan menggunakan rumus persentase tumbuh tanaman, dan menggunakan rumus penerimaan untuk mengetahui penerimaan pendapatan usaha swadaya kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng.

Setelah melakukan penelitian maka dapat disimpulkan sejarah pengelolaan areal hutan kemasyarakatan diawali dengan diturunkannya SK Menhutbun No.677/Kpts-II/98 yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat disekitar hutan untuk turut mengelola dan mendayagunakan potensi sumberdaya hutan. Salah satu program yang dapat didayagunakan dalam penerapan keputusan menteri tersebut adalah program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund). Rangkaian kegiatan pembuatan hutan kemasyarakatan di laksanakan pada tahun 1999 namun pada tahun 2000 program ini gagal yang disebabkan adanya kebakaran hutan. Setelah mengalami kebakaran, pada tahun 2001 BPDAS (Balai pengelolaan Daerah Aliran Sungai) memberikan bantuan bibit kepada masyarakat namun mengalami kegagalan yang sama pada tahun 2003 yang disebabkan oleh kebakaran. Dari kegagalan tersebut kelompok tani mulai berinisiatif sendiri untuk melakukan usaha sendiri yaitu usaha swadaya jambu mete pada tahun 2004. Akhirnya dalam kurun waktu tiga tahun tanaman jambu tersebut dapat berproduksi dan dapat dirasakan hasilnya.

Adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan pembagunan hutan kemasyarakatan adalah terbentuknya organisasi kelompok tani dari program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) yang manfaatnya dirasakan sampai sekarang, memperoleh lahan usaha hutan kemasyarakatan, walaupun sampai saat ini belum mendapatkan surat izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan memberikan tambahan pendapatan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*ASSALAMUALAIKUM WR. WB*

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini diselesaikan atas bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi materil maupun moril. Untuk itu, pada kesempatan ini secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis menghanturkan banyak terima kasih kepada Bapak **Ir. Abdul Rasyid Kalu, MS** dan **Dr.Ir.H. Mas'ud Junus, M.Sc** selaku pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah dan hidayah-Nya kepada beliau berdua.

Tak lupa pula penulis menyampaikan terimah kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Prof.Dr.Ir.H. Muhammad Restu, MP** selaku Dekan Fakultas Kehutanan
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Mappatoba Sila, M.Sc** sebagai Penasehat Akademik.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Syamsu Alam, MS, Dr. Ir. H. Supratman, MP**, dan **Dr. Ir. H. Muhammad Dassir, M.Si** sebagai dosen penguji yang telah memberikan bantuan, saran, koreksi dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah SWT memberikan amal jariyah bagi ilmu yang diberikan.
4. Ibu **Dewi** yang baik hati
5. Bapak Kepala Desa Mattirotasi ( om **Drs. Zainuddin, MM**), Ketua Kelompok Tani Rimba Harapan, dan Ketua LSM
6. Om **Bahar** terimah kasih atas pinjaman bukunya
7. Spesial "**Muh. Imran, S.Hut (iting jelek)**" makasih atas motivasi dan bantuannya selama ini (kita bersaing cari kerja !!!)
8. Sahabat suka dan duka-ku, teman seperjuanganku, "**Novi lilidarsi**". Terimah kasih atas semuanya. "*Dari kamu kutau apa arti sahabat sesungguhnya*".
9. Sahabat- sahabatku : **Ia', Anti, Tiwi, Cuni, Maypa, Ery, Anci, Arnet, Fatimah, QQardi, Hermin, Adi, Kahar (semangat!!), Abdi, dan Wantor women**, terima kasih atas semuanya.
10. Rekan-rekan angkatan 04, teman Pu XVII, teman KKN dan teman seperjuangan PKMR 32. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

Terkhusus, sembah sujud dan hormat penulis hanturkan kepada Ayahanda **Drs. Rajamuddin Patta, M.Pd,** ibunda **Dra. Jumriah** dan saudara- saudaraku tersayang **Ria Andriani, A.Md.Pi, Khusnul Arifah, A. Rahmat Nur Alifka, A. Muh Faisal** yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, dan motivasi yang kuat dengan segala jerih payahnya hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Kekurangan dan keterbatasan pada dasarnya ada pada setiap sesuatu yang tercipta di alam ini , tidak terkecuali skripsi ini. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati penulis terbuka menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun guna penyempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, tiada kata yang patut penulis ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho dan berkah-Nya atas amalan kita di dunia dan akhirat. Amin.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Februarii 2009

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Deskripsi Tanaman Jambu Mete.....	5
B. Prngertian Hutan Kemasyarakatan.....	6
C. Pengelolaan Hutan kemasyarakatan.....	8
D. Bantuan OECF.....	10
E. Bantuan swadaya masyarakat.....	11
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	13
B. Penentuan populasi dan sampel .....	13
C. Teknik pengumpulan data dan jenis data.....	14
D. Analisis Data.....	15
E. Konsep Operasional .....	18
<b>IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Keadaan Fisik Wilayah.....	20
1. Letak dan Luas.....	20
2. Geologi dan Tanah.....	21
B. Keadaan Sosial Ekonomi .....	23
1. Penduduk .....	23
2. Mata Pencaharian.....	24
3. Pendidikan.....	25



4. Agama dan Adat istiadat .....	26
----------------------------------	----

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan .....	27
1. Program OECF.....	27
2. Program BPDAS .....	29
3. Program Swadaya.....	30
B. Hasil Hutan Kemasyarakatan .....	31
1. Program OECF.....	31
a. Terbentuk Organisasi.....	32
b. Memperoleh Lahan Usaha Hutan kemasyarakatan .....	49
2. Program BPDAS .....	50
a. Organisasi .....	52
b. Pengembangan Organisasi .....	53
c. Memperoleh lahan usaha hutan kemasyarakatan.....	54
3. Program Swadaya.....	55
a. Organisasi .....	56
b. Persentase tumbuh tanaman.....	62
c. Penerimaan pendapatan kelompok tani.....	63
d. Legalitas lahan.....	65

## VI. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

No	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Luas Areal Berdasarkan Kelas Lereng di Desa Mattirotasi .....	21
2.	Data Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1997 – 2006) di Desa Mattirotasi Kec. Wattangpulu Kab. Sidrap .....	22
3.	Luas Desa, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, dan kepadatan Penduduk, di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap. ....	23
4.	Jenis Pekerjaan Penduduk di Desa Mattirotasi Wattangpulu Kapupaten Sidrap.....	24
5.	Jenis Tanaman yang ditanam program OECF di Desa Mattirotasi .....	32
6.	Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan Hak dan Kewajiban dalam Kelompok Tani Sipakainge dan Sipatuodeceng pada Program OECF dan BPDAS .....	39
7.	Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan Penerapan Larangan dalam Kelompok Tani Sipakainge dan Sipatuodeceng Program OECF dan BPDAS.....	42
8.	Distibusi Frekwensi Responden Berdasarkan Aturan Kepengurusan Kelompok Tani Sipakainge dan Sipatuodeceng Sesuai Program OECF dan BPDAS.....	44
9.	Distribusi Frekwensi Responden Terhadap Penerapan Sanksi-Sanksi Kelompok Tani Sipakainge dan Sipatuodeceng pada Program OECF dan BPDAS .....	47
10.	Jumlah Intensitas Pertemuan Program OECF.....	48
11.	Jenis tanaman dan jumlah bibit Bantuan BPDAS Blok 1.....	51
12.	Jumlah Pelaksanaan Rapat yang diikuti Kelompok Tani Sipakainge dan Sipatuodeceng Program BPDAS.....	52

13.	Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan Hak dan Kewajiban dalam Kel Tani Sipakainge dan kel.tani Sipatuodeceng pada Program Swadaya.....	57
14.	Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan Larangan Keanggotaan dalam Kelompok Tani Sipakainge dan Sipatuodeceng Program Swadaya.....	59
15.	Distibusi Frekwensi Responden Berdasarkan Aturan Kepengurusan Kelompok Tani Sipakainge Dan Sipatuodeceng Sesuai Program Swadaya.....	60
16.	Distribusi frekuensi responden Berdasarkan penerapan sanksi-sanksi kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng program Swadaya.....	61
17.	Tingkat Penerimaan Pendapatan Responden (Rp/Thn) Usaha Jambu mete Kelompok Tani Sipakainge di Desa Mattirotasi Kecamatan Wattangpulu, Kabupatn Sidrap.....	73
18.	Tingkat Pendapatan Responden (Rp/Thn) Usaha Jambu mete Kelompok Tani Sipatuodeceng di Desa Mattirotasi Kecamatan Wattangpulu Kabupatn Sidrap.....	73



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b><u>Teks</u></b>	<b>Halaman</b>
1.	Struktur Organisasi Kelompok Tani Rimba Harapan di Kecamatan Lawa dari Petani ke Produsen Akhir.....	34

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Quisioner responden.....	70
2.	Identitas Responden Anggota Kelompok Tani Sipakainge Program OECF dan BPDAS di Desa Mattirotasi, Kecamatan Wattangpulu, Kabupaten Sidrap. ....	73
3.	Identitas Responden Anggota Kelompok Tani Sipatuodeceng Program OECF dan BPDAS di Desa Mattirotasi, Kecamatan Wattangpulu, Kabupaten Sidrap. ....	74
4.	Identitas Responden Anggota Kelompok Tani Sipakainge Program Swadaya di Desa Mattirotasi, Kecamatan Wattangpulu, Kabupaten Sidrap.....	75
5.	Identitas Responden Anggota Kelompok Tani Sipatuodeceng Program Swadaya di Desa Mattirotasi, Kecamatan Wattangpulu, Kabupaten Sidrap.. ....	76
6.	Jumlah bibit untuk pembangunan Pilot Project HKM di Desa Mattirotasi.....	77
7.	Jumlah Rapat yang diikuti oleh Kelompok tani Sipakainge Program OECF.....	78
8.	Jumlah Rapat yang diikuti Kel.tani Sipatuodeceng Program OECF....	79
9.	Jumlah Tanaman Yang Ditanam Anggota Kelompok Tani Sipakainge Program BPDAS Sebelum Terjadi Kebakaran.....	80
10.	Jumlah Tanaman Yang Ditanam Anggota Kelompok Tani Sipatuodeceng Program BPDAS Sebelum Terjadi Kebakaran.....	81
11.	Jumlah Rapat yang Diikuti Kelompok Tani Sipakainge dan Sipatuodeceng Program BPDAS.....	82
12.	Jumlah Rapat yang diikuti Kelompok Tani Sipakainge Program Swadaya.....	84
13.	Jumlah Rapat yang diikuti Kelompok Tani Sipatuodeceng Program Swadaya.....	85

14. Jumlah Tanaman yang Ditanam Kel.Tani Sipakainge Program Swadaya.....	86
15. Jumlah Tanaman Yang Ditanam Kel.Tani Sipatuodeceng Program Swadaya.....	87
16. Penerimaan Petani Hasil Usaha Swadaya Jambu Mete Kel.Tani Sipakainge Tahun 2007.....	88
17. Penerimaan Petani Hasil Usaha Swadaya Jambu Mete Kel.Tani Sipakainge Tahun 2008.....	89
18. Penerimaan Petani Hasil Usaha Swadaya Jambu Mete Kel.Tani Sipatuodeceng Tahun 2007.....	90
19. Penerimaan Petani Hasil Usaha Swadaya Jambu Mete Kel.Tani Sipatuodeceng Tahun 2008.....	91
20. Foto- Foto Kegiatan.....	92

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam konteks Indonesia , kehutanan masyarakat diartikan sebagai sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu, komunitas atau kelompok, pada lahan negara, lahan komunal, lahan adat atau lahan milik (individu/keluarga) untuk memenuhi kebutuhan individu/rumahtangga dan masyarakat, serta dapat diusahakan secara komersil dan non komersil. Pendekatan komersial dan non komersial akan mempengaruhi bentuk-bentuk teknologi, dan organisasi sosial pelaksana kehutanan masyarakat.

Hutan kemasyarakatan merupakan peluang legal dari pemerintah yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengelolah kawasan hutan. Perubahan paradigma pengelolaan hutan, harus dikelola dengan baik agar tujuan masyarakat sejahtera dengan hutan lestari sesungguhnya dapat diwujudkan. Pembangunan hutan kemasyarakatan merupakan suatu sistem pembangunan kehutanan melalui pendekatan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya hutan kemasyarakatan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk hak pengusahaan hutan kemasyarakatan (HPHKM), yakni hak yang diberikan oleh menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat melalui penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Pembangunan hutan kemasyarakatan bantuan OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) dimaksudkan sebagai upaya penyiapan prakondisi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan melalui pengembangan kelembagaan masyarakat yang mandiri dan mengakar dimasyarakat dengan didukung oleh hutan yang berpotensi lestari dalam satu kesatuan sistem pengusahaan hutan kemasyarakatan secara lestari, memulihkan fungsi hutan, meningkatkan mutu dan produktifitas serta melestarikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dan meningkatkan lapangan kerja.

Salah satu proyek yang ditetapkan di Sulawesi Selatan yaitu Pilot Project hutan kemasyarakatan bantuan OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) dengan upaya memperbaiki potensi sumberdaya hutan pada kawasan yang rusak . Pilot Proyek hutan kemasyarakatan merupakan unit percontohan pada suatu areal hutan kemasyarakatan yang dilakukan di kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung yang rusak dan perlu direhabilitasi. Sasaran lokasi Pilot Proyek bantuan OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) dilaksanakan di 3 (tiga) kabupaten yaitu : Kabupaten Jeneponto, Maros dan Sidrap dengan sasaran pembangunan infrastruktur fisik hutan kemasyarakatan seluas 2.500 ha dan terbentuknya kelompok unit atau koperasi masyarakat sekitar hutan. Luas pembangunan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Maros 500 ha, Kabupaten Sidrap 1000 ha, dan Kabupaten Jeneponto 1000 ha.



Lokasi I Dusun Pabbaresseng Desa Mattiroitasi Kecamatan Wattangpulu Kabupaten Sidrap merupakan salah satu desa yang dijadikan kegiatan pembangunan Pilot Project hutan kemasyarakatan di Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas areal 1000 ha. Dalam 1000 Ha dibagi menjadi 3 blok yaitu blok 1 seluas 152 ha, blok 2 seluas 600 ha dan blok 3 seluas 248 ha . Pada lokasi I dusun pabbaresseng memiliki luas 152 Ha tetapi lokasi yang ditanami hanya 105 ha sesuai dengan kondisi lahan yang rencana dikelola, berhubung dengan keadaan lokasi yang tidak memungkinkan. Pada Blok 1 terbentuk kelompok tani Rimba Harapan dimana kelompok tani ini terbagi atas 4 kelompok tani yaitu kelompok tani Sipakainge, Sipatuodeceng, Mattirowalie, dan Sipatuo II. Pilot Project OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) mengelola lokasi I pada tahun 1999-2000 dan mengalami kegagalan yang disebabkan kebakaran, pada tahun berikutnya yakni 2001-2003 BPDAS (Balai pengelolaan Daerah Aliran Sungai) memberikan bantuan bibit, namun kegagalan kembali terjadi akibat kebakaran . Pada tahun 2004 - 2008 pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh masyarakat dari usaha swadaya masyarakat itu sendiri. Tanaman yang ditanam dari hasil usaha swadaya masyarakat yaitu tanaman jambu mete.

. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Mattirotasi , Kecamatan Wattangpulu , Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga dapat diketahui seberapa besar hasil yang didapatkan dari pengelolaan hutan kemasyarakatan tersebut.

## **B. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sejarah pengelolaan hutan kemasyarakatan
2. Mengetahui hasil pengelolaan hutan kemasyarakatan

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dan pengembangan hutan kemasyarakatan secara berkelanjutan di Desa Mattirotasi, Kecamatan Wattangpulu, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Tanaman Jambu Mete (*Anacardium occidentale* Linn)

#### 1. Sistematika

Menurut Tjitrosoepomo (1988), Jambu mete mempunyai kedudukan dalam ilmu sistematika tumbuh-tumbuhan sebagai berikut :

Devisio	: Spermatophyta
Sub Devisio	: Angiospermae
Class	: Dicotyledoneae
Ordo	: Sapindales
Famili	: Anacardiaceae
Genus	: <i>Anacardium</i>
Species	: <i>A. occidentale</i>

#### 2. Syarat Tumbuh

Menurut Marlina ( 1994 ) , pada dasarnya tanaman jambu mete dapat tumbuh disembarang tempat . Akan tetapi tanaman jambu mete akan tumbuh dengan lebih baik bila lingkungan hidupnya menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan baik.

Lingkungan hidup tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tanah, iklim, tinggi - rendah letak geografis, pengairan dan faktor biotik yang menyangkut gangguan hama, pathogen (penyebab Penyakit) dan tumbuhan pengganggu atau gulma. Faktor- faktor tersebut di atas saling terkait satu sama lain. Dalam dunia tumbuh-tumbuhan faktor-faktor itu disebut faktor ekologi.

### **B. Pengertian Hutan Kemasyarakatan**

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dengan menitik beratkan kepentingan kesejahteraan masyarakat (Anonim, 2000).

Social forestry (SF) adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan Negara dan atau hutan hak , dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama dan atau mitra dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan. Dalam pelaksanaannya social Forestry dapat diintegrasikan dengan program nasional strategis lainnya (misalnya ketahanan pangan, pendidikan luar sekolah dan peningkatan usaha kecil dan menengah/koperasi) (Departemen Kehutanan, 2003).

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007 tentang hutan kemasyarakatan adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya untuk memberdayakan masyarakat setempat. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap



masyarakat setempat dalam mengelolah hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dalam mengelolah hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.677/Kpts-II/1999 tentang hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan Negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan kepentingan mensejahterakan masyarakat. Dalam ketentuan ini, terdapat paradigma baru yaitu adanya perusahaan hutan kemasyarakatan didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengambilan manfaat.
2. Masyarakat sebagai pengambil keputusan dan menentukan sistem perusahaan
3. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau kegiatan
4. Kepastian hak dan kewajiban semua pihak
5. Kelembagaan perusahaan ditentukan oleh masyarakat
6. Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya.

### **C. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan**

Pembangunan hutan kemasyarakatan harus dilandasi dengan prinsip pengelolaan kehutanan masyarakat prinsip dimana prinsip tersebut adalah : Prinsip berkeadilan , Partisipasi, kemandirian, Desentralisasi, Kemitraan, Keberlanjutan, Pertanggung jawaban kepada masyarakat (Anonim, 1999).

Anonim (2002) menyebutkan Kriteria wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan (WPHKm) adalah sebagai berikut :

1. WPHKm berada pada kawasan hutan produksi, produksi terbatas, dan hutan lindung.
2. Kegiatan hutan kemasyarakatan di dalam WPHKm dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, penanaman dan budidaya tanaman pertanian dengan tanaman kayu-kayuan dengan pola usaha "Wanatani" sesuai dengan prinsip-prinsip ekologi dan ketentuan berlaku.
3. WPHKm harus kompak dan rasional dapat dikelola masyarakat secara menguntungkan tanpa mengganggu fungsi pokok hutannya.
4. WPHKm harus permanen dengan batas-batas luar dan "enclove" yang permanen.

5. Suatu wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan dibagi menjadi dua atau lebih lokasi pengelolaan dan masing-masing wilayah pengelolaan dikelola oleh satu kelompok masyarakat setelah memperoleh izin kegiatan hutan kemasyarakatan dari bupati/walikota
6. Setiap lokasi pengelolaan merupakan unit pengelolaan yang secara ekonomis mandiri dan dapat dikelola berdasarkan asas manfaat dan lestari.
7. Kelompok masyarakat yang dapat mengelola satu lokasi pengelolaan hutan kemasyarakatan, telah berada didalam kawasan tersebut selama 5 tahun atau lebih. Kelompok masyarakat lainnya (kurang 5 tahun domisili) dalam suatu wilayah pengelolaan tidak dapat dipertimbangkan untuk memperoleh izin kegiatan hutan kemasyarakatan sebelum kelompok masyarakat domisili 5 tahun dipenuhi permohonan izin kegiatan pengelolaannya.
8. Suatu lokasi pengelolaan hutan kemasyarakatan harus tergabung dalam suatu wilayah hutan kemasyarakatan . Selanjutnya, suatu wilayah hutan kemasyarakatan harus bergabung dengan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan lainnya dan bersama-sama dan sinergis membentuk suatu kesatuan yang optimal yang disebut KWP hutan kemasyarakatan (Kesatuan Wilayah Pengelolaan HKm)

#### **D. Bantuan Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF)**

Pembangunan hutan kemasyarakatan bantuan OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) dimaksudkan sebagai upaya penyiapan prokondisi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan melalui pengembangan kelembagaan masyarakat yang mandiri dan mengakar di masyarakat dengan didukung oleh hutan yang berpotensi lestari dalam satu kesatuan sistem pengusahaan hutan kemasyarakatan sesuai KEP-MENHUTBUN No.677/Kpts-II/1998

Tujuan pembangunan hutan kemasyarakatan bantuan OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) yaitu menyiapkan prakondisi kelembagaan masyarakat yang mandiri dan mengakar di masyarakat dalam pengusahaan hutan kemasyarakatan secara lestari, memulihkan fungsi hutan, meningkatkan mutu dan produktifitas serta melestarikan sumberdaya hutan, meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Sasaran lokasi bantuan OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) ini kawasan hutan produksi dan atau kawasan hutan lindung yang rusak dan perlu direhabilitasi di 3 Kabupaten : Kabupaten Maros, Jeneponto dan Sidrap. Sasaran Areal Pembangunan hutan kemasyarakatan bantuan OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) adalah kawasan hutan yang masuk dalam usulan pencadangan hutan kemasyarakatan oleh Kakanwil setempat dengan kriteria sebagai berikut :



1. Kawasan hutan produksi dan atau kawasan hutan lindung direhabilitasi.
2. Kawasan hutan yang belum dibebani Hak atau HPHTI kawasan hutan yang sudah dibebani hak tersebut tetapi akan segera berakhir masa berlakunya atau sedang dalam proses pengusulan pencabutan.
3. Kawasan hutan yang relative berdekatan dengan pemukiman atau telah cukup lama menjadi tempat tinggal masyarakat (Anonim, 1999).

#### **E. Usaha Swadaya Masyarakat**

Usaha swadaya adalah merupakan bentuk kreatifitas kerja dan kemampuan sendiri untuk melakukan suatu kegiatan tanpa harus tergantung adanya modal bantuan dari pihak lain (Zain, 1998).

Menurut Ismawan (2003), ada 3 (tiga) faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan kelompok swadaya :

1. Faktor internal, yaitu faktor yang terdiri dari sub faktor anggota, sub faktor pengurus, sub faktor kegiatan dan sub faktor mekanisme kerja. Semakin berkembang anggota secara kualitatif dan kuantitatif, semakin tinggi dedikasi dan waktu yang tersedia serta kemampuan pengurus, semakin banyak kegiatan kelompok yang melayani kepentingan anggota dan semakin baik mekanisme kerja yang ada di dalam kelompok maka akan semakin berpeluang kelompok tersebut untuk berhasil.

2. Faktor eksternal yang terdiri dari sub faktor lingkungan sosial ekonomi, sub faktor hubungan dengan pamong dan sub faktor program pemerintah yang ditujukan untuk pengembangan wilayah dimana kelompok swadaya tersebut berada. Semakin besar potensi sosial ekonomi yang menunjang perkembangan kelompok swadaya tersebut, serta semakin baik hubungan kelompok swadaya dengan pamong setempat, dan adanya program-program pemerintah yang menguntungkan bagi pengembangan kelompok swadaya tersebut, maka kelompok swadaya itu akan berpeluang untuk berkembang dengan lebih baik.
3. Faktor Lembaga Pengembangan yang meliputi sub faktor wawasan Lembaga Pengembangan, sub faktor organisasi Lembaga Pengembangan, dan sub faktor tenaga yang tersedia dari Lembaga Pengembangan tersebut. Semakin tepat wawasan Lembaga Pengembangan, serta semakin berkemampuan organisasi Lembaga Pengembangan, dan semakin tersedia tenaga yang berkemampuan untuk melayani kelompok swadaya, maka akan semakin berpeluang bagi kelompok swadaya untuk mencapai tingkat-tingkat keberhasilannya.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember 2008. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Mattirotasi, Kecamatan Wattangpulu, Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **B. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah anggota kelompok tani Rimba harapan yaitu Sipakainge dan kelompok tani Sipatuodeceng lokasi 1 di dusun Pabbaresseng, Desa Mattirotasi, Wattangpulu, Kabupaten Sidrap. Penentuan sampel responden pada penelitian ini secara sensus, yaitu : mengambil responden secara keseluruhan (objek atau populasi) pada program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) dan BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) jumlah responden yang diambil sebanyak 53 orang sedangkan jumlah responden untuk program swadaya masyarakat sebanyak 26 orang terdiri dari kelompok tani Sipakainge 11 orang dan Sipatuodeceng 15 orang.

## C. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data

### 1. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya-jawab yang dikerjakan secara sistematis melalui melibatkan masyarakat.

#### b. Observasi Langsung

Observasi langsung, yaitu cara pengamatan melalui kontak langsung dengan fakta fisik dan realitas sosial masyarakat di lapangan.

### 2. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan lapangan dan wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan (Kuesioner) yang ditanyakan langsung kepada masyarakat kelompok tani Rimba Harapan ( Sipakainge dan Sipatuodeceng) sebagai responden, serta pengamatan langsung di lapangan yang menyangkut : nama petani , umur petani, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, penerimaan pendapatan dari hasil penanaman jambu mete, jarak tanam, tempat tinggal petani, harga jual jambu mete, dan jumlah tanaman jambu mete yang ditanam.

## b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka hasil-hasil penelitian sebelumnya, instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian.

### **D. Analisis Data**

Untuk mengetahui hasil program OECF, BPDAS, dan Swadaya masyarakat maka digunakan analisis seperti dibawah ini :

#### 1. Kelembagaan Kelompok Tani

Adapun data dalam kelembagaan yang diukur dalam penelitian ini mengenai

a. Struktur organisasi kelembagaan meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota serta fungsi-fungsi yang terlaksana/tidak terlaksana, bermanfaat/tidak bermanfaat pada anggota kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng

#### b. Aturan - aturan organisasi

Tanggapan masing-masing masyarakat/kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng mengenai aturan-aturan yang meliputi larangan dan aturan kepengurusan kelompok yang dilaksanakan, apakah aturan tersebut di laksanakan/ tidak dilaksanakan .

#### c. Sanksi – sanksi

Tanggapan masing-masing masyarakat/kelompok tani mengenai penerapan/pelaksanaan sanksi-sanksi yang dilaksanakan.

d. Intensitas kegiatan Organisasi

Pelaksanaan rapat/pertemuan masing-masing program pada anggota kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng

Berdasarkan Data diatas maka dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Deskriptif kualitatif dan tabulasi/persentase.

2. Akses Lahan

Tanggapan anggota kelompok tani mengenai legalitas lahan yang dikelola tiap program,dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

3. Persentase tumbuh

Untuk mengetahui persentase tumbuh pada hasil usaha swadaya masyarakat tanaman jambu mete maka digunakan rumus sebagai berikut :

a. Persentase tumbuh tanaman untuk masing-masing anggota kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng

$$Pi = \frac{tr}{tt} \times 100 \%$$

Keterangan : Pi = Persentase tumbuh tanaman pada masing-masing kelompok tani Ke-i (%)

tr = Jumlah tanaman yang tumbuh pada masing-masing lokasi anggota kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng

tt = Jumlah tanaman yang ditanam pada lahan masing-masing anggota kelompok tani Sipakainge dan Sipatudeceng

i = orang 1,2,3.....n

- b. Rata-rata Persentase tumbuh tanaman untuk keseluruhan anggota kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng

$$\sum Pi = \frac{\sum tr}{\sum tt} \times 100 \%$$

Keterangan :  $\sum Pi$  = Jumlah Persentase tumbuh tanaman pada kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng

$\sum tr$  = Jumlah tanaman yang tumbuh pada lokasi kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng

$\sum tt$  = Jumlah tanaman yang ditanam pada kelompok tani Sipakainge dan Sipatudeceng

#### 4. Analisis Penerimaan

Penerimaan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah penerimaan pendapatan usaha swadaya jambu mete tahun 2007 dan 2008. Rumus yang digunakan yakni :

**Penerimaan = Jumlah Satuan Hasil Produksi x Harga Satuan**

## E. Defenisi Operasional

Untuk menuntun peneliti dalam melakukan penelitian dan untuk menyamakan persepsi dengan pihak lain, maka perlu ditetapkan defenisi operasional dan pengukuran sebagai berikut :

1. **Masyarakat** adalah sekelompok orang yang melaksanakan kegiatan proyek Pilot bantuan OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) di Desa Mattirotasi, Kecamatan Wattangpulu, Kabupaten Sidrap
2. **Hutan Kemasyarakatan** adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan, pengurusan, dan penyelenggaraan hutan dan kehutanan yang bertujuan untuk memberdayakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mengelola (mengusahakan) hutan tanpa mengganggu fungsi pokok kawasan hutan.
3. **Wilayah Pengelolaan Hutan kemasyarakatan** adalah kawasan hutan di Desa Mattirotasi Kecamatan Wattangpulu Kabupaten Sidrap yang ditetapkan oleh Kakanwil setempat untuk kegiatan hutan kemasyarakatan.
4. **OECF (Overseas Economic Cooperation Fund)** adalah Yayasan dari Jepang yang memberikan bantuan terhadap kawasan hutan yang masuk dalam usulan pencadangan hutan kemasyarakatan oleh Kakanwil setempat.



5. **Kelompok Tani** adalah suatu perkumpulan petani yang anggotanya mempunyai kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan baik sosial, ekonomi, budaya maupun sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, keakraban dan keserasian dan memiliki kehendak yang sama untuk melakukan upaya pelestarian sumberdaya alam yang dimilikinya.
6. **Usaha swadaya** merupakan bentuk kreatifitas kerja dan kemampuan sendiri untuk melakukan suatu kegiatan tanpa harus tergantung adanya modal bantuan dari pihak lain
7. **Legalitas** berdasarkan Undang-undang RI No.41 pasal 50 tahun 1999 tentang kehutanan adalah orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
8. **Keberhasilan organisasi kelompok tani** adalah kemampuan kelompok untuk menghasilkan jasa/barang sesuai dengan standar yang telah ditentukan menyangkut produktifitas tanamannya
9. **Kelembagaan** adalah sekumpulan ketentuan yang mengatur hubungan antara individu manusia yang memberikan batasan haknya, mengenali hak individu lainnya, hak istimewa dengan disertai tanggung jawab.
10. **Deskriptif kualitatif** adalah pemaparan atau penguraian secara jelas yang dapat diamati oleh individu atau masyarakat.

## IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Keadaan Fisik Lokasi

#### 1. Letak dan Luas

Salah satu pembangunan Pilot Porject OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) berada di Desa Mattirotasi, Kecamatan Wattangpulu, Kabupaten Sidrap, dengan luas wilayah desa sekitar 34,06 km<sup>2</sup> dari 151,31 km<sup>2</sup> yang merupakan luas wilayah Kecamatan Wattangpulu dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lainungan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Buae
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota madya Pare-Pare
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang

#### 2. Topografi

Hasil analisis peta topografi menunjukkan bahwa kondisi topografi lokasi umumnya bergelombang sampai berbukit. Kelas-kelas lereng yang termasuk dalam lokasi rencana pembangunan Pilot Project Hutan Kemasyarakatan lebih jelasnya dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Luas Areal Berdasarkan Kelas Lereng di Desa Mattirotasi

No	Kelas Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0-8	31	3,1
2	8-15	42	4,2
3	15-25	375	37,5
4	25-40	436	43,6
5	> 40	116	11,6
	<b>Jumlah</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

Sumber : BPDAS dalam angka tahun 1999.

Berdasarkan pada data tersebut di atas, maka areal yang datar/landai (0%-15%) hanya sekitar 73 ha, miring (15%-40%) seluas 811 ha dan sangat miring (>40%) seluas 116 ha.

### 3. Geologi dan Tanah

Berdasarkan hasil survei dan hasil pengamatan serta analisis peta-peta yang tanah yang ada, kondisi tanah pada daerah ini umumnya tergolong pada tahap berkembang dan belum mencapai tahap lanjut. Batuan pada permukaan tanah, hampir ditemukan pada keseluruhan luasan lokasi rencana pembangunan Pilot Project hutan Kemasyakatan ini. Solum tanah agak dangkal dan berbatu. Jenis tanah yang ada di lokasi ini adalah jenis tanah regosol seluas 1000 ha (Sumber : Kantor BPDAS dalam angka tahun 1999).

#### 4. Iklim

Data curah hujan rata-rata dari Station Penakar Pabbaresseng Kabupaten Sidrap selama 10 tahun terakhir, dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 2 .

Tabel 2. Data Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1997 – 2006) di Desa Mattirotasi Kec. Wattangpulu Kab. Sidrap

Bln	T a h u n										Rata-rata
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Jan	R	R	0	0	499	251	137	180	265	198	153
Feb	R	R	0	329	371	129	298	117	119	303	166,60
Mar	R	R	0	271	373	205	150	324	196	133	165,2
Apr	R	R	0	167	251	192	166	237	389	128	153
Mei	R	R	0	0	40	247	173	127	87	91	76,5
Jun	R	R	0	329	285	301	73	8	43	112	105,1
Jul	R	R	0	91	12	19	60	23	157	22	38,4
Agt	R	R	2,5	101	22	46	38	0	10	9	84,8
Sep	R	R	0	13	73	29	49	4	0	0	16,8
Okt	R	R	377,3	207	62	0	103	0	308	0	105,73
Nop	R	R	164,5	183	288	240	154	261	154	193	163,75
Des	R	R	367	421	402	162	932	112	193	0	258,9

Sumber : Stasiun Penakar Pabbaresseng Kabupaten Sidrap, 2006.

Catatan : 0 : Tidak hujan

R : Rusak

- : Tidak hujan

## B. Keadaan Sosial Ekonomi

### 1. Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Desa Mattirotasi dari Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap, diperoleh informasi Keadaan penduduk Desa Mattirotasi Kecamatan Wattangpulu Kabupaten Sidrap, seperti disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas Desa, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, dan kepadatan Penduduk, di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap.

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga (KK)
1	Lainungan	25,70	2.996	664
2	Mattirotasi	34,06	1.887	565
3	Arawa	12,21	2.557	675
4	Uluale	9,12	5.118	1055
5	Lawawoi	10,02	2.886	732
6	Bangkai	7,03	2.125	492
7	Carawali	8,92	2.124	580
8	Buae	32,57	3.227	895
9	Batu Lappa	8,08	3.455	895
10	Ciro-Ciroe	3,60	1.033	257
	<b>Jumlah</b>	<b>151,31</b>	<b>27,342</b>	<b>6,810</b>

Sumber : Kantor Kecamatan Wattangpulu Kabupaten Sidrap, 2008

Tabel 3 menunjukkan bahwa Kecamatan Wattangpulu terdiri dari 10 desa/kelurahan dengan luas wilayah 151,31 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 27.342 jiwa, jumlah rumah tangga 6.810 KK.

## 2. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk di Desa Mattirotasi bermata pencaharian bertani sawah dan berkebun. Disamping itu beberapa diantaranya beternak, berdagang, mengembangkan industri rumah tangga, serta sedikit yang bergerak disektor angkutan, industri, pemerintahan dan jasa. Gambaran mata pencaharian penduduk disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Jenis Pekerjaan Penduduk di Desa Mattirotasi Kecamatan Wattangpulu Kabupaten Sidrap.

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian bahan makanan	457
2.	Peternakan	5
3.	Perkebunan	147
4.	Perdagangan	49
5.	Industri	18
6.	Angkutan dan Komunikasi	23
7.	Pemerintahan dan jasa	37
8.	Lain-Lain	19
<b>Jumlah</b>		<b>755</b>

Sumber: Kantor BPS Kabupaten Sidrap, 2001

Berdasarkan Tabel 4 di atas maka pada umumnya mata pencaharian penduduk di Desa Mattirotasi adalah sebagai petani, yaitu sebanyak 457 orang, sedangkan berkebun sebanyak 147 orang, pemerintahan dan jasa sebanyak 37 orang, pedagang sebanyak 49 orang, industri atau kerajinan rumah tangga sebanyak 18 orang, angkutan dan komunikasi sebanyak 23 orang, peternakan sebanyak 5 orang.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Desa Mattirotasi sehingga pengetahuan dan teknologi pertanian sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

### 3. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di sekitar lokasi penelitian dinilai sudah cukup memadai, karena sudah tersedia TK, SD, SMP. Selain itu, bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi seperti SMA dan Perguruan Tinggi harus melanjutkan di ibukota Kabupaten yang jaraknya 22 km atau di ibu kota provinsi seperti Makassar yang jaraknya kurang lebih 175 km (3 – 4 jam perjalanan) dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat.

Sarana kesehatan yang ada dapat dikatakan sudah memenuhi jumlah yang diharapkan. Sarana dan prasarana penunjang seperti fasilitas kesehatan sangat diperlukan di setiap desa atau kelurahan. Di Desa Mattirotasi fasilitas kesehatan yang tersedia berupa posyandu sebanyak 3 serta Poliklinik/balai pengobatan sebanyak 1 unit (Sumber : Profil Desa Mattirotasi, 2006).

#### 4. Agama dan Adat istiadat

Penduduk sekitar Desa Mattirotasi Kecamatan Wattangpulu Kabupaten Sidrap mayoritas beragama Islam sebanyak 1846 sedangkan agama lain yang dianut adalah Hindu (Taulotan) sebanyak 11 orang. Mereka taat dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya serta menghargai adat istiadat yang diwujudkan dalam bentuk selamatan dan perayaan hari besar agama mereka. Sebagian besar penduduk berasal dari suku Bugis dan sehingga dialek bahasa yang dipergunakan sehari-hari merupakan Bahasa Bugis (Sumber : Profil Desa Mattirotasi, 2006).



## **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sejarah Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan**

#### **1. Program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund)**

Kawasan hutan yang terdapat di Desa Matirotasi awalnya adalah lahan kritis yang merupakan lahan yang telah berpuluh-puluh tahun diterlantarkan dan tidak dimanfaatkan. Masyarakat disekitar hutan tersebut ingin memanfaatkan kawasan tersebut namun akibat tidak adanya bantuan sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan kawasan tersebut dan masyarakat hidup dibawah taraf kemiskinan.

Berdasarkan SK Menhutbun No. 677/Kpts-II/98 yang memberikan kepercayaan dan peluang kepada masyarakat di sekitar hutan untuk turut mengelola dan mendayagunakan potensi sumberdaya hutan. Salah satu program yang dapat didayagunakan dalam penerapan keputusan menteri tersebut adalah Sektor Program Loan (SPL) OECF (Overseas Economic Cooperation Fund). Program SPL OECF-INP 22 TA 1998/1999 merupakan program yang dimaksudkan untuk menunjang penanggulangan krisis pangan dan pengangguran melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan pada lahan-lahan di sekitar atau di dalam kawasan hutan.

Program SPL OECF- INP 22 ini untuk jangka pendek diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan menyediakan pangan bagi masyarakat sekitar hutan. Untuk jangka menengah dan panjang program ini diharapkan dapat

meningkatkan produktivitas hutan, memperbaiki kualitas lingkungan, melindungi sumberdaya hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan secara berkesinambungan.

Pada tahun 1999 beberapa rangkaian kegiatan pembuatan hutan kemasyarakatan telah dilaksanakan diantaranya kegiatan pengaturan areal garapan dan pemasangan pal-pal batas. Beranjak pada tahun 2000 dilakukan penanaman dimana tanaman yang ditanam yaitu tanaman Kemiri, Jambu Mete, Jati, Mahoni, Caliandra, Eucalyptus, Lamtoro, Kapuk, dan Nangka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 6.

Namun pada bulan Maret tahun 2000 timbul permasalahan yang ditemui dilapangan yaitu adanya serangan hama seperti tikus, semut dan serangga, sehingga merusak tanaman dalam jumlah yang sangat besar. Selain serangan hama, sifat/kondisi iklim ( curah hujan) yang cepat berubah. Pada bulan April dan Mei curah hujan di daerah ini dibawah normal sehingga mengakibatkan tanaman mengalami kekeringan.

Pada akhir tahun 2000 permasalahan kembali muncul yaitu adanya kebakaran hutan yang disebabkan musim kemarau yang sangat panjang, kegiatan pembersihan lahan garapan, dan kegiatan pengembalaan. Adanya kebakaran hutan mengakibatkan tanaman yang ditanam habis terbakar, sehingga program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) di desa Mattirotasi mengalami kegagalan dan dikatakan tidak berhasil.

## 2. Program BPDAS ( Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai)

Pada awal tahun 2001, setelah program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) tidak berhasil yang diakibatkan adanya kebakaran hutan maka anggota kelompok tani Rimba harapan mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah setempat. Akhirnya pemerintah setempat melalui BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) memberikan bantuan bibit sebanyak 22.000 ribu bibit (jenis tanaman dan jarak tanam dapat dilihat pada lampiran 7) yang diserahkan kepada kelompok tani (khusus kelompok tani Rimba Harapan). Selain memberikan bantuan bibit BPDAS ( Balai pengelolaan Daerah Aliran Sungai) juga memberikan kesempatan kepada kelompok tani untuk mengadakan bibit sendiri dengan imbalan upah sesuai dengan bibit yang mereka siapkan. Luas areal kegiatan penanaman dan pemeliharaan hutan kemasyarakatan adalah 105 Ha dan kegiatan ini dilakukan dalam kurun waktu 2001- 2002.

Namun pada awal tahun 2003 bencana kebakaran kembali terjadi sehingga tanaman bantuan bibit dari BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) habis terbakar, yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran karena faktor musim kemarau yang panjang, kegiatan pembersihan lahan garapan dan kegiatan penggembalaan.

### 3. Program Swadaya

Pada tahun 2004, kelompok tani Rimba Harapan ( Sipakainge dan Sipatuodeceng) melakukan inisiatif untuk mengusahakan bibit sendiri. Melalui kegiatan swadaya ini, akhirnya mereka bisa mengadakan bibit Jambu Mete (*Anacardium occidentale*) sebanyak  $\pm$  22.000 bibit. Setiap anggota kelompok tani mendapat pembagian bibit  $\pm$  200 bibit untuk ditanam di areal hutan kemasyarakatan dengan jarak tanam 7m x 7m . Akhirnya dalam kurun waktu tiga tahun (pada tahun 2007) tanaman jambu mete ini sudah dapat memberikan hasil (berproduksi). Sehingga kelompok tani Rimba Harapan (Sipakainge dan Sipatudeceng) sampai sekarang dapat merasakan hasilnya.

## **B. Hasil Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan**

### **1. Program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund)**

Sesuai dengan tujuan Pembangunan Pilot Project hutan kemasyarakatan , yaitu mengupayakan pembangunan usaha tani hutan terpadu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan fungsi-fungsi hutan, maka pola tanam di dalam pembangunan Pilot Project hutan kemasyarakatan dipilih pola agroforestry dengan sistem tumpang sari dan pengayaan tanaman.

Penanaman bibit dilakukan dengan sistem tumpang sari yaitu dilakukan dengan menanam tanaman semusim/tanaman pangan diantara tanaman pohon-pohonan . Penanaman dengan sistem tumpang sari ini dilakukan dua atau tiga tahun pada awal penanaman , pada saat tanaman pohon-pohonan belum cukup besar/tinggi untuk menciptakan naungan pada ruang antara tanaman pohon - pohonan. Jenis - jenis tanaman semusim/pangan yang digunakan disesuaikan dengan keinginan petani dengan tetap memperhatikan kondisi tanah, iklim, dan pasar dari komoditi tersebut. Jenis tanaman yang ditanam dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5. Jenis Tanaman yang ditanam program OECF di Desa Mattirotasi

Jenis Tanaman		
MPTS	Kayu-Kayuan	Tanaman Semusim
Kemiri	Jati	Jagung
Jambu mete	Eucalyptus	Kacang Tanah
Randu	Mahoni	Kedelai
Asam/Nangka	Lamtoro	

Sumber : Rancangan Tekhnis,1999

Jenis tanaman yang ditanam di Desa Mattirotasi pada pembangunan Pilot Project hutan kemasyarakatan terdiri dari tanaman MPTS yaitu Kemiri 257.280 batang, Asam/Nangka 3.420 batang, Jambu mete 167.040 batang dan Randu 3.420 batang. Untuk tanaman kayu-kayuan seperti Jati 231.760 batang, Eucalyptus/Gmelina 6.150, Mahoni 6.250 batang dan Lamtoro 334.080 batang. Sedangkan untuk tanaman semusim, tanaman yang ditanam yaitu jagung 3.960 kg , kacang tanah 6600 kg dan kedelai 7.920 kg. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 6. Namun pada tahun 2000 program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) mengalami kegagalan akibat kebakaran hutan. Walaupun program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) mengalami kegagalan dari segi persentase tumbuh tanaman tetapi dapat memberikan hasil yang lain yang dapat dilihat sampai sekarang. Hasil yang diperoleh dari program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) yaitu :

a. Terbentuk Organisasi (Kelompok Tani)

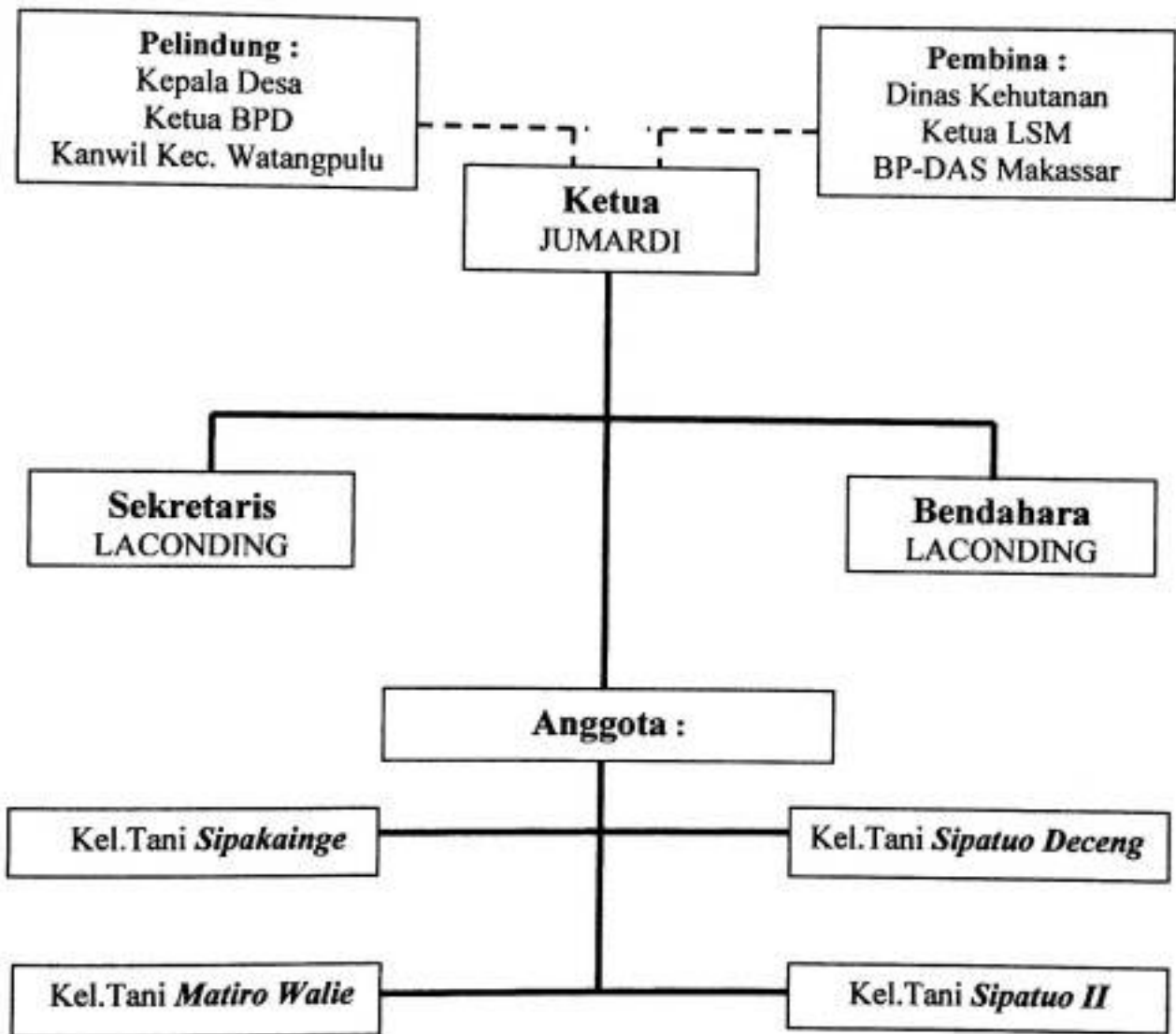
Program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) merupakan program yang mengupayakan pembinaan lahan-lahan hutan termasuk masyarakatnya, sehingga dibentuklah kelembagaan (organisasi). Kelompok tani

yang terbentuk diharapkan berperan untuk mensukseskan program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) yaitu mengupayakan pemberdayaan masyarakat lokal/masyarakat yang berdomisili di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk lebih menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari. Dengan adanya organisasi kelompok tani maka terbentuk pula struktur, aturan, sanksi, dan pertemuan kelompok. Dimana dalam struktur, sanksi dan aturan-aturan dapat mengikat anggotanya sehingga kelompok tani dapat terorganisir dengan baik. Untuk lebih jelasnya struktur, aturan, sanksi, dan pertemuan kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1) Struktur Organisasi Kelompok Tani

Kelompok tani Rimba Harapan peserta hutan kemasyarakatan terdiri dari 4 kelompok tani yaitu kelompok Tani Sipakainge, Sipatudeceng, Sipatuo 1 dan kelompok tani Mattirowalie. Yang menjadi pelindung kelompok tani adalah Kepala Desa, Kepala BPD, dan Kanwil Kecamatan Wattangpulu, sedangkan yang bertugas sebagai Pembina kelompok adalah dari Dinas kehutanan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan BPDAS Makassar (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai). Struktur Organisasi kelompok tani Rimba Harapan hutan kemasyarakatan disajikan pada gambar 1.

**Struktur Organisasi**  
**Kelompok Usaha Bersama (KUB)**  
**Rimba Harapan**



Keterangan :    - - - - - = Garis Koordinasi  
                           — — — — — = Garis Komando

Gambar 1. Struktur Organisasi Kelompok Tani Rimba Harapan



Fungsi dari setiap komponen pada struktur organisasi kelompok tani peserta hutan kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

a) Pelindung

Pelindung berfungsi untuk melindungi dan bertanggung jawab atas keberadaan kelompok tani. Serta bertanggung jawab atas aktifitas-aktifitas kelompok secara legal , dan mengawasi kegiatan kelompok tani baik fisik maupun lembaganya.

b) Pembina

Pembina berfungsi untuk memfasilitasi kelompok dalam pemanfaatan sumberdaya dan keterampilan, pemberi dukungan, mengorganisir kelompok, membangkitkan kesadaran kelompok, menyampaikan informasi, memberikan bimbingan dan pengarahan serta petunjuk secara langsung kepada kelompok tani dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kelompok baik secara teknis maupun kelembagaan.

c) Ketua

Ketua berfungsi menjalankan tugas-tugas, memimpin rapat anggota dan rapat pengurus, ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat yang lain yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan kelompok , menjalankan tugas-tugas lain yang lazim dikerjakan oleh seorang ketua dan /atau tugas-tugas menurut ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga kelompok.

d) Sekretaris

Sekretaris bertugas membuat serta memelihara berita acara yang sah dan lengkap dari rapat-rapat anggota dan rapat-rapat pengurus . Sekretaris bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan, sesuai dengan keentuan di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Sekretaris menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan keputusan pengurus yang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

e) Bendahara

Bendahara bertugas sebagai pelaksana harian kelompok di bawah bimbingan dan pengawasan pengurus, tanpa mengurangi pembatasan dan pengawasan yang ditetapkan oleh pengurus. Bendahara berkewajiban melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

- (1) Memelihara semua bukti keuangan, barang-barang tanggung/jaminan, surat-surat berharga, dan barang-barang lain yang menjadi milik kelompok.
- (2) Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga yang dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan dalam usaha kelompok.
- (3) Menyimpan dan memelihara semua arsip yang lengkap mengenai segala transaksi keuangan kelompok, menyimpan dengan baik semua buku, bon, surat berharga, dan barang-barang tanggungan/jaminan sedemikian rupa sehingga setiap saat tersedia untuk diperiksa oleh badan pemeriksa.

- (4) Membuat rincian keuangan selambat-lambatnya dalam 10 hari setelah bulan berakhir dan menempelkannya di kantor kelompok/secretariat kelompok.
- (5) Membuat pertanggung jawaban keuangan dan statistik dalam waktu selambat-lambatnya 15 hari setelah tahun pembukuan berakhir yang telah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota badan pemeriksa yang ditempelkan paling kurang 1 bulan lamanya ditempat yang mudah dilihat dikantor kelompok.
- (6) Menerima semua pembayaran atas nama kelompok dan menyimpannya ditempat yang aman yang ditentukan oleh pengurus , selambat-lambatnya 48 jam setelah menerimanya.
- (7) Melakukan semua tugas lain, seperti membuat surat perjanjian pinjaman dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas-tugas bendahara.

f) Anggota

(1) Hak anggota kelompok Tani

- (a) Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan kelompok bila menghadapi ancaman atau masalah yang berkaitan dengan lahan garapan kebun dan seluruh hasilnya.
- (b) Setiap anggota berhak atas lahan garapan/kebun dan seluruh hasilnya.
- (c) Dalam kegiatan kelompok setiap anggota mempunyai hak suara baik dalam bentuk saran, pendapatan atau pertimbangan dalam setiap pertemuan kelompok maupun mengajukan usul untuk diadakan pertemuan kelompok.

(d) Setiap anggota mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus kelompok.

(2) Kewajiban anggota kelompok tani

(a) Setiap anggota diwajibkan untuk menanam dan memelihara tanaman dalam areal garapannya.

(b) Setiap anggota wajib mencegah terjadinya pencurian, penebangan pohon/tanaman dan pengrusakan tanaman.

(c) Setiap anggota wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan, perambahan/pembabatan hutan, penebangan kayu dikawasan hutan kemasyarakatan baik yang dilakukan oleh anggota kelompok tani maupun dari anggota kelompok tani lain serta warga diluar anggota kelompok tani hutan kemasyarakatan.

(d) Setiap anggota wajib melaporkan kepada pengurus kelompok apabila mengetahui adanya pencurian hasil kebun/penebangan dan pengrusakan kebun baik yang dilakukan oleh anggota sendiri maupun anggota kelompok lain atau warga lain.

Tabel 6. Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan Hak dan Kewajiban dalam Kelompok Tani Sipakainge dan Sipatuodeceng pada Program OECF dan BPDAS

No	Hak Dan Kewajiban Keanggotaan	Terlaksana		Ragu-ragu		Tidak terlaksana	
		F	%	F	%	F	%
1.	Hak Anggota Kel.Tani	53	100				
2.	Kewajiban Anggota Kel.Tani	40	75,5			13	24,5

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2008.

- Ket : Terlaksana = Hak dan Kewajiban keanggotaan dalam KTH dilaksanakan oleh responden  
 Ragu-ragu = Responden tidak mengetahui terlaksana atau tidaknya Hak dan kewajiban keanggotaan dalam Kelompok tani  
 Tidak terlaksana = Syarat keanggotaan tidak terlaksana dalam KTH  
 F = jumlah responden  
 % = Persentase

Tabel 6 menunjukkan semua anggota kelompok tani program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) dan BPDAS ( Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) telah menerima haknya sebagai anggota diantaranya

- (a) Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan kelompok bila menghadapi ancaman atau masalah yang berkaitan dengan lahan garapan kebun dan seluruh hasilnya.
- (b) Setiap anggota berhak atas lahan garapan/kebun dan seluruh hasilnya.

- (c) Dalam kegiatan kelompok setiap anggota mempunyai hak suara baik dalam bentuk saran, pendapatan atau pertimbangan dalam setiap pertemuan kelompok maupun mengajukan usul untuk diadakan pertemuan kelompok.
- (d) Setiap anggota mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus kelompok.

Sementara itu untuk pemenuhan kewajiban dapat diketahui bahwa tidak semua anggota dari kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng telah melaksanakan kewajibannya yang diantaranya

- (a) Setiap anggota diwajibkan untuk menanam dan memelihara tanaman dalam areal garapannya.
- (b) Setiap anggota wajib mencegah terjadinya pencurian, penebangan pohon/tanaman dan pengrusakan tanaman.
- (c) Setiap anggota wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan, perambahan/pembabatan hutan, penebangan kayu dikawasan hutan kemasyarakatan baik yang dilakukan oleh anggota kelompok tani maupun dari anggota kelompok tani lain serta warga diluar anggota kelompok tani hutan kemasyarakatan.
- (d) Setiap anggota wajib melaporkan kepada pengurus kelompok apabila mengetahui adanya pencurian hasil kebun/penebangan dan pengrusakan kebun baik yang dilakukan oleh anggota sendiri maupun anggota kelompok lain atau warga lain.

Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi dari kelompok tani untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Selain itu adanya kontrol dari lembaga yang terkait tidak rutin dilaksanakan sehingga ada anggota kelompok tani yang tidak melaksanakan kewajibannya.

## 2) Aturan- Aturan kelompok Tani Sipakainge dan Sipatuodeceng

### (a) Larangan anggota kelompok tani

- (1) Setiap anggota dilarang menebang tanaman/pohon di kebun sendiri atau di kebun orang lain kecuali tanaman pengganggu tanpa seijin pihak berwajib dan atau ada kesepakatan.
- (2) Setiap anggota dilarang menebang pohon MPTS / kayu-kayuan atau tanaman lain di kebun anggota kelompok untuk dijadikan bahan bangunan/kayu bakar atau untuk dijual kecuali telah ada secepatan/izin dari pihak berwajib.
- (3) Setiap anggota dilarang membakar kebun baru atau memperluas kebun lama dengan cara membakar belukar atau hutan tua dan/atau menyerobot anggota lain.
- (4) Setiap anggota dilarang mengambil hasil kebun dari orang lain kecuali ada izin dari yang berhak.
- (5) Setiap anggota dilarang menadah hasil curian dari kebun orang lain.

Tabel 7. Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan Persepsi Penerapan Larangan dalam Kelompok Tani Sipakainge dan Sipatuodeceng Program OECF dan BPDAS

Persepsi Penerapan Larangan	Terlaksana		Ragu-ragu		Tidak terlaksana	
	F	%	F	%	F	%
Larangan 1	53	100				
Larangan 2	53	100				
Larangan 3	25	47,2			28	52,8
Larangan 4	53	100				
Larangan 5	53	100				

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2008.

- Ket : Terlaksana = Persepsi Penerapan larangan dalam KTH disetujui oleh responden  
 Ragu-ragu = Persepsi Responden tidak mengetahui terlaksana atau tidaknya penerapan larangan dalam KTH  
 Tidak terlaksana = Persepsi Penerapan larangan tidak terlaksana dalam KTH  
 F = jumlah responden  
 % = Persentasasi

Tabel 7 menunjukkan penerapan larangan dalam kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng tidak semuanya terlaksana, berdasarkan hasil wawancara aturan pada poin tiga : “Setiap anggota dilarang membakar kebun baru atau memperluas kebun lama dengan cara membakar belukar atau hutan tua dan atau menyerobot anggota lain”. Ternyata terdapat 28 anggota kelompok tani yang tidak melaksanakan seperti yang tertera pada aturan kelompok tani poin 3 . Yang menjadi penyebabnya adalah setiap orang ingin memperluas kebun mereka dengan harapan akan menambah



jumlah penghasilan mereka nantinya. Tanpa memperhatikan aturan keanggotaan tersebut. Adapun cara memperluas kebun dengan dibakar hal ini dilakukan dengan maksud mengurangi biaya mempercepat proses kerja.

(b) Aturan Kepengurusan Kelompok.

1. Pengurus kelompok tani dipilih melalui musyawarah kelompok yang melibatkan semua anggota kelompok.
2. Masa tugas pengurus berlangsung selama 2 tahun dan setiap pengurus lama dapat dipilih kembali melalui musyawarah kelompok yang melibatkan semua anggota kelompok.
3. Sebelum berakhir masa tugasnya pengurus kelompok harus mengadakan musyawarah kelompok yang melibatkan semua anggota kelompok sebagai mekanisme pertanggung jawaban kepengurusan yang berakhir dan sekaligus sebagai mekanisme pemilihan pengurus baru.
4. Struktur kepengurusan kelompok tani terdiri unsur ketua, sekretaris, dan bendahara.
5. Untuk melancarkan kegiatan kelompok, setiap kelompok tani dapat membentuk struktur tambahan melalui hasil musyawarah yang melibatkan semua anggota. Setiap anggota dapat dipilih menjadi pengurus, mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab dan dapat bekerjasama dengan orang lain.

Tabel 8. Distribusi Frekwensi Persepsi Responden Berdasarkan Aturan Kepengurusan Kelompok Tani Sipakainge dan Sipatuodeceng Sesuai Program OECF dan BPDAS

Kepengurusan Kelompok	Terlaksana		Ragu-ragu		Tdk terlaksana	
	F	%	F	%	F	%
Aturan Kepengurusan kelompok 1	53	100				
Aturan Kepengurusan kelompok 2	53	100				
Aturan Kepengurusan kelompok 3	53	100				
Aturan Kepengurusan kelompok 4	53	100				
Aturan Kepengurusan kelompok 5	53	100				
Aturan Kepengurusan kelompok 6	53	100				


Sumber : Data Primer setelah diolah, 2008.

- Ket : Terlaksana = Aturan kepengurusan kelompok dalam KTH dilaksanakan oleh responden  
 Ragu-ragu = Responden tidak mengetahui terlaksana atau tidaknya aturan kepengurusan kelompok dalam KTH  
 Tidak terlaksana = Aturan Kepengurusan kelompok tidak terlaksana dalam KTH  
 F = Jumlah responden  
 % = Persentase

Tabel 8 menunjukkan semua responden mengatakan aturan kepengurusan kelompok telah dilaksanakan sepenuhnya yaitu pengurus kelompok tani terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, pengurus dipilih melalui musyawarah kelompok yang melibatkan seluruh anggota kelompok serta masa tugas pengurus berlangsung selama dua tahun.

### 3) Sanksi-sanksi

- a) Setiap anggota yang tidak menanam tanaman umur panjang (tanaman MPTS dan kayu-kayuan) di dalam lahan garapannya dalam jangka satu tahun dalam terhitung sejak kesepakatan ini dibuat maka kebunnya akan diambil alih oleh kelompok dalam penggunaannya akan ditetapkan dalam suatu musyawarah kelompok.
- b) Setiap anggota yang menebang tanaman/merusak kebun tanpa seizin oleh pihak berwajib dan atau alasan tertentu akan dikenakan denda dalam bentuk uang tunai antara Rp.2.000.000 sampai Rp.20.000.000 berdasarkan tingkat kerugian yang ditetapkan dalam musyawarah kelompok
- c) Setiap anggota yang menebang pohon dalam lahannya maupun lahan orang tanpa seizin kelompok maka kayu hasil tebangan disita oleh kelompok atau pelakunya dilaporkan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- d) Setiap anggota yang menebang kayu di hutan untuk dijadikan kebun atau memperluas kebunnya maka lahan bukaannya disita dan dihutankan kembali oleh kelompok serta palakunya memperoleh sanksi dari pengurus.
- e) Setiap anggota yang terbukti mencuri hasil kebun orang lain harus mengembalikan hasil curiannya dan mengganti rugi berdasarkan kerugian yang diderita pemiliknya (kesepakatan) dan pelakunya diberi teguran dan pembinaan dari pengurus kelompok.

- 
- f) Setiap anggota yang terbukti menadah hasil curian, harus mengembalikan barang tadahan tersebut atau mengganti rugi kepemilikannya
  - g) Setiap anggota atau warga yang dengan sengaja atau tidak sengaja membakar hutan akan ditangkap dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
  - h) Setiap anggota atau warga mengembala kambing atau sapi di lahan hutan kemasyarakatan dan merusak tanaman yang ada, maka akan dikenakan denda berupa uang tunai sesuai dengan tingkat kerusakan tanaman.

Tabel 9. Distribusi Frekwensi Responden Terhadap Persepsi terhadap Penerapan Sanksi-Sanksi Kelompok Tani Sipakainge dan Sipatuodeceng pada Program OECF dan BPDAS

No	Persepsi masyarakat tentang Penerapan Sanksi –sanksi	Terlaksana		Ragu-ragu		Tidak terlaksana	
		F	%	F	%	F	%
1.	Penerapan Sanksi point a	53	100				
2.	Penerapan Sanksi point b	53	100				
3.	Penerapan Sanksi point c	23	43,4	18	33,9	12	22,7
4.	Penerapan Sanksi point d	53	100				
5.	Penerapan Sanksi point e	53	100				
6.	Penerapan Sanksi point f	53	100				
7.	Penerapan Sanksi point g	53	100				
8.	Penerapan Sanksi point h	53	100				

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2008.

- Ket : Terlaksana = Penerapan sanksi KTH dilaksanakan oleh responden  
 Ragu-ragu = Responden tidak mengetahui terlaksana atau tidaknya penerapan sanksi dalam KTH  
 Tidak terlaksana = Penerapan sanksi tidak terlaksana dalam KTH  
 F = Jumlah responden  
 % = Persentase

Tabel 9 menunjukkan tidak semua penerapan sanksi terlaksana, seperti penerapan sanksi pada point c yaitu setiap anggota yang menebang pohon dalam lahannya maupun lahan orang lain untuk dijadikan bahan bangunan/keperluan lain maka hasil tebangan disita oleh kelompok dan pelakunya dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. 23 responden atau 43,4 % mengatakan terlaksana, 33,9% responden

mengatakan ragu-ragu apakah sanksi tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan 22,7 yang mengatakan penerapan sanksi-sanksi tidak terlaksana. Hal ini disebabkan masyarakat takut terlibat apabila melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

#### 4) Intensitas Pertemuan/Rapat

Intensitas pertemuan pada program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) dilakukan selama 1 tahun berturut-turut, dengan rincian pertemuan 3 kali dalam sebulan oleh pemateri yang berbeda, masing-masing melaksanakan 1 kali dalam sebulan. Adapun Pembawa materi pertemuan pada program ini yaitu MMC (Management Monitoring Consultant), WasLaiDal (Pengawas, Penilai, dan Pengendalian), dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini :

Tabel 10. Jumlah Intensitas Pertemuan Program OECF

Program	Pembawa rapat	Jumlah pertemuan (setahun)
OECF	MMC (Managemen Monitoring Consultant)	1 x sebulan selama 1 thn
	WasLaiDal (Pengawas, pelatihan, pengendalian)	1 x sebulan selama 1 thn
	LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)	1 x sebulan selama 1 thn

Berdasarkan hasil wawancara pada masing-masing anggota kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng, maka dapat diketahui jumlah anggota kelompok tani yang hadir dalam pertemuan pada program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) dapat dilihat pada lampiran 7 dan 8. Pada lampiran 7 dan 8 menunjukkan bahwa pelaksanaan rapat pada kelompok tani Sipakainge dan Sipatudeceng pada bulan 1 sampai bulan 12 berjalan lancar yang dilaksanakan tiga bulan sekali. Rapat ini dilaksanakan tiga kali sebulan karena pembawa materi berbeda-beda, yakni dari MMC ( Management Monitoring Consultant) , WasLaiDal ( Pengawas, Penilai, dan Pengendalian) , dan LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat). Walaupun pelaksanaan rapat ini adalah sesuai dengan rencana OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) dan kesepakatan bersama anggota kelompok tani . Namun berdasarkan tabel diatas pelaksanaan rapat kadang-kadang tidak semuanya dihadiri oleh kelompok tani dikarenakan adanya kepentingan pribadi.

b. Memperoleh lahan usaha Hutan Kemasyarakatan

Berdasarkan SK Menhutbun No. 677/Kpts-II/98 yang memberikan kepercayaan dan peluang kepada masyarakat di sekitar hutan untuk turut mengelola dan mendayagunakan potensi sumberdaya hutan. Salah satu program yang dapat didayagunakan dalam penerapan keputusan menteri tersebut adalah Sektor Program Loan (SPL) OECF (Overseas Economic Cooperation Fund). Dengan adanya program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) maka masyarakat/kelompok tani memiliki kepastian hukum, dimana program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) tersebut memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan. Program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) ini sesuai dengan Undang-undang No. 41 tentang kehutanan pasal 50 yang berbunyi dikatakan legal apabila orang telah diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

## 2. Program BPDAS ( Balai Pengelolaan Daerah Aliran sungai)

Setelah Pilot Project OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) mengalami kegagalan pada tahun 1999-2000 yang di sebabkan oleh kebakaran. Maka bantuan bibit diambil alih oleh BPDAS ( Balai pengelolaan Daerah Aliran Sungai) , dengan cara pemberian bibit kepada anggota kelompok tani, jumlah bibit yang diberikan ±22.000 bibit. Namun pemberian bibit diberikan hanya kepada anggota kelompok tani yang tidak dapat menyediakan kebutuhan bibit pada lahan masing-masing. Untuk kelompok tani yang mampu menyediakan kebutuhan bibit untuk setiap lahannya diberikan bantuan dana pengganti dari bibit yang mereka siapkan.

Penentuan jenis tanaman bantuan BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) disesuaikan dengan kondisi tanah, lingkungan dan keinginan masyarakat. Jenis tanaman yang ditanam yaitu berdasarkan tanaman hasil rekomendasi oleh masyarakat, yaitu tanaman Jambu mete, Kemiri, Mahoni , Kapuk, Pinang , Jati lokal dan jati putih.



Tabel 11. Jenis tanaman dan jumlah bibit Bantuan BPDAS Blok 1

Jenis Tanaman	Jarak tanam (m)	Jumlah Bibit/ha (105 ha)
Jambu Mete	5 x 5 – 10 x 10	400
Jati lokal	5 x 5	400
Kemiri	5 x 5 - 10 x 10	500
Gmelina	5 x 5	500
Mahoni	5 x 5	500
Kapuk	5	200
Pinang	5	200

Sumber : Ketua Kelompok Tani Rimba Harapan

Jarak tanam di lokasi kegiatan hutan kemasyarakatan program BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) yaitu untuk jenis tanaman pokok atau MPTS (Jambu mente dan Kemiri) antara 5m x 5 m – 10m x 10 m, jarak tanam untuk jenis tanaman kayu-kayuan seperti Jati lokal, Jati Putih digunakan 5m x 5 m dan untuk tanaman Mahoni 5m x 5 m, serta untuk tanaman pembatas seperti kapuk dan pinang jarak tanam yang digunakan 5m x 5m. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh data hasil penanaman/orang sebelum kebakaran yang dapat dilihat pada lampiran 9 dan 10. Persentase tumbuh tanaman program BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) hanya 10% (berdasarkan Informasi ketua kelompok tani Blok 1). Hal ini disebabkan bencana kebakaran yang kembali terulang pada tahun 2002, sehingga Program BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) dinyatakan gagal.

Hasil yang diperoleh dari program BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) adalah :

a. Organisasi tetap ada

Struktur, aturan, serta sanksi-sanksi tetap dilaksanakan seperti pada program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) namun yang membedakan hanya intensitas pertemuan rapatnya, hal ini disebabkan karena pembawa materi hanya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) . Kelompok tani masih dijalankan dengan maksud agar masing-masing kelompok tani dapat dilindungi oleh kelembagaan, dan dengan masih adanya kelompok tani maka kegiatan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan tetap dapat terorganisir, dan terstruktur sesuai dengan fungsi- fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa pelaksanaan intensitas pertemuan program BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) berbeda dengan OECF (Overseas Economic Cooperation Fund), namun jumlah pesertanya sama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 12 dibawah ini :

Tabel 12 . Jumlah Pelaksanaan Rapat yang diikuti Kelompok Tani Sipakainge dan Sipatuodeceng Program BPDAS

Pembawa Rapat	Jumlah Rapat			Jumlah
	2001	2002	2003	
LSM ( Lembaga swadaya Masyarakat)	1 x (bulan pertama) 4 x (selama 11 bulan)	4 x	4 x	13 x

Sumber : Data Primer setelah diolah,2009

Tabel 12 menunjukkan pertemuan pada program BPDAS ( Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) tahun 2001-2003 dibawah oleh LSM ( Lembaga swadaya masyarakat). LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat) bertugas sebagai pembawa materi atau pembawa rapat pada program ini, pertemuan ini dilaksanakan satu kali sebulan pada bulan pertama. Untuk bulan kedua, tahun 2001 sampai tahun 2003 pertemuan dilaksanakan satu kali dalam tiga bulan. Perubahan ini sesuai dengan rencana BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 11 dan 12.

b. Pengembangan Organisasi/Kelembagaan kelompok tani

Peran aktif kelembagaan dalam hal ini kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng sangat menentukan keberhasilan program atau kegiatan dalam masyarakat desa dimana masyarakat desa memiliki ketergantungan lahan sangat tinggi, keadaan tanah berbatu, solum tipis dan kesuburan rendah, gangguan ternak yang tidak dikendalikan dan kebakaran hutan. Hal tersebut mengakibatkan

kerusakan lahan akibat pengelolaan, upaya pengelolaan lahan masih menggunakan pola tradisional maka dari itu pengembangan kelompok tani Sipakainge dan Sipatudeceng dilakukan dengan cara difasilitasi mulai dari pendampingan agar dapat tumbuh dan berkembang dan diharapkan menjadi kelompok usaha yang produktif dan mandiri.

Kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng mendapat bimbingan dari fasilitator lapangan agar dapat tumbuh berkembang menjadi kelompok tani yang mandiri. Fasilitator lapangan akan menjadi pendamping kelompok tani pada kegiatan-kegiatan diharapkan mempunyai visi dan misi yang baik sehingga terwujud kelembagaan petani yang mandiri sekaligus memperlihatkan usaha produktif yang realitas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik yang ada dalam kawasan maupun yang ada di sekitar kawasan hutan.

c. Memperoleh lahan usaha Hutan Kemasyarakatan

Berdasarkan SK Menhutbun No. 677/Kpts-II/98 yang memberikan kepercayaan dan peluang kepada masyarakat disekitar hutan untuk turut mengelola dan mendayagunakan potensi sumberdaya hutan. Salah satu program yang dapat didayagunakan dalam penerapan keputusan menteri tersebut adalah Sektor Program Loan (SPL) OECF (Overseas Economic Cooperation Fund). Dengan adanya program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) maka masyarakat/kelompok tani memiliki kepastian hukum sampai pada program BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) karena program ini merupakan program lanjutan dari OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) . Dimana

program BPDAS ( Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan dan mengoptimalkan pendapatannya dari lahan tersebut. Sehingga akses masyarakat/kelompok tani Rimba Harapan (Sipakainge dan Sipatuodeceng) terhadap lahan besar dalam arti legalitas (kejelasan status) atas lahan tersebut jelas yaitu untuk dikelola oleh masyarakat setempat.

### 3. Program Swadaya

Setelah melihat kegagalan pada program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) dan BPDAS ( Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai), pada tahun 2004 kelompok tani berinisiatif sendiri untuk menanam kembali areal hutan kemasyarakatan dengan bantuan swadaya masyarakat. Adapun tanaman yang ditanam pada hutan kemasyarakatan yaitu tanaman Jambu mete dengan jarak tanam 7m x 7m. Salah satu alasan kelompok tani Rimba Harapan (Sipakainge dan Sipatuodeceng) hanya menanam tanaman jambu mete disebabkan karena pada umumnya petani di desa Mattirotasi telah mengetahui nilai produksi jambu mete, selain itu jenis tanaman jambu mete pertumbuhannya lebih baik karena sesuai dengan kondisi di areal hutan kemasyarakatan di desa Mattirotasi.

Salah satu hasil dari program swadaya kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng yang dapat dirasakan yaitu dapat memberikan tambahan pendapatan masyarakat terhadap keberhasilan usaha swadaya jambu mete,

berpeluang untuk mendapatkan legalitas lahan pengelolaan serta masih terbentuknya organisasi/kelembagaan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti dibawah ini :

a. Organisasi tetap ada

Struktur, aturan, hak, kewajiban, pengurusan kelompok serta sanksi-sanksi tetap dilaksanakan serta masih bermanfaat sampai sekarang. Kelompok tani masih dijalankan dengan maksud agar masing-masing kelompok tani dapat dilindungi oleh kelembagaan yang memiliki aturan-aturan dan struktur terhadap masalah yang diperoleh serta kegiatan dapat terstruktur dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa pelaksanaan struktur, aturan, hak, kewajiban, pengurusan kelompok dan sanksi-sanksi yang telah dilaksanakan pada program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) dan BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) tetap terlaksana pada program Swadaya. Namun pada program swadaya anggota kelompok tani menjadi berkurang menjadi 26 orang hal ini disebabkan karena banyaknya kelompok tani yang kurang aktif (program OECF dan BPDAS) dalam pelaksanaan pemeliharaan pengelolaan lahan yang telah dikuasainya. Bagi anggota kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng yang kurang aktif akan diberikan surat teguran, dan apabila dalam jangka waktu 1 bulan setelah surat teguran tersebut dikeluarkan dan anggota kelompok tani tersebut tidak merespon maka dinyatakan mengundurkan diri dan bersedia memindah tangankan lahannya

sesuai dengan persetujuan bersama. Persentase anggota kelompok tani dalam melaksanakan hak dan kewajiban, aturan dan sanksi lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1) Hak dan Kewajiban

Tabel 13. Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan Hak dan Kewajiban dalam Kel Tani Sipakainge dan kel.tani Sipatuodeceng pada Program Swadaya

No	Hak Dan Kewajiban Keanggotaan	Terlaksana		Ragu-ragu		Tdk terlaksana	
		F	%	F	%	F	%
1.	Hak Anggota Kel.Tani	26	100				
2.	Kewajiban Anggota Kel.Tani	23	88,46			3	11,5

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2008.

- Ket : Terlaksana = Hak dan Kewajiban keanggotaan dalam KTH dilaksanakan oleh responden
- Ragu-ragu = Responden tidak mengetahui terlaksana atau tidaknya Hak dan kewajiban keanggotaan dalam Kel.tani
- Tidak terlaksana = Syarat keanggotaan tidak terlaksana dalam KTH
- F = Jumlah responden
- % = Persentase

Tabel 13 menunjukkan semua responden (anggota dari kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng) telah menerima hak-haknya diantaranya :

- a) Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan kelompok bila menghadapi ancaman atau masalah yang berkaitan dengan lahan garapan kebun dan seluruh hasilnya.
- b) Setiap anggota berhak atas lahan garapan/kebun dan seluruh hasilnya.
- c) Dalam kegiatan kelompok setiap anggota mempunyai hak suara baik dalam bentuk saran, pendapatan atau pertimbangan dalam setiap pertemuan kelompok maupun mengajukan usul untuk diadakan pertemuan kelompok.
- d) Setiap anggota mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus kelompok.

Sedangkan dari 26 responden ada beberapa anggota kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota yaitu 11,5%. Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi dan rasa tanggungjawab dalam hal pelaksanaan kewajiban diantaranya tidak melaporkan jika terjadi pencurian kayu, dan terkadang ada juga yang melakukan pembukaan areal baru dengan cara membakar atau merusak hutan dengan tanpa izin dari pihak yang terkait.



2) Aturan- aturan kelompok tani

(a) Larangan bagi anggota kelompok tani

Sama halnya dengan tabel 14 dibawah ini penerapan larangan kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng program swadaya tidak sepenuhnya terlaksana dimana terdapat anggota kelompok tani yang membakar kebun baru atau memperluas kebun lama dengan cara membakar belukar, yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dari anggota kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng.

Tabel 14. Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan Persepsi dan Penerapan Larangan Keanggotaan dalam Kelompok Tani Sipakainge dan Sipatuodeceng Program Swadaya

Persepsi Responden dalam Penerapan Larangan	Terlaksana		Ragu-ragu		Tdk terlaksana	
	F	%	F	%	F	%
Larangan 1	26	100				
Larangan 2	26	100				
Larangan 3	23	88,46			3	11,53
Larangan 4	26	100				
Larangan 5	26	100				

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2008.

- Ket : Terlaksana = Penerapan larangan menurut persepsi KTH dilaksanakan oleh responden
- Ragu-ragu = Persepsi Responden yang tidak mengetahui terlaksana atau tidaknya penerapan larangan dalam KTH
- Tidak terlaksana = Penerapan larangan tidak terlaksana menurut Persepsi KTH
- F = Jumlah responden
- % = Persentase

(b) Aturan Kepeguruan Kelompok

Tabel 15. Distibusi Frekwensi mengenai Persepsi Responden Berdasarkan Aturan Kepengurusan Kelompok Tani Sipakainge Dan Sipatuodeceng Sesuai Program Swadaya

Persepsi Aturan Kepengurusan Kelompok	Terlaksana		Ragu-ragu		Tdk terlaksana	
	F	%	F	%	F	%
Kepengurusan Kelompok 1	26	100				
Kepengurusan kelompok 2	26	100				
Kepengurusan kelompok 3	26	100				
Kepengurusan kelompok 4	26	100				
Kepengurusan kelompok 5	26	100				
Kepengurusan kelompok 6	26	100				

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2008.

- Ket : Terlaksana = Persepsi Kepengurusan Kelompok menurut KTH dilaksanakan oleh responden  
Ragu-ragu = Persepsi Responden tentang terlaksana atau tidaknya kepengurusan kelompok dalam KTH  
Tidak terlaksana = Kepengurusan kelompok tidak terlaksana menurut Persepsi KTH  
F = Jumlah responden  
% = Persentase

Tabel 15 diatas menunjukkan semua responden mengatakan bahwa semua aturan kepengurusan kelompok telah terlaksana yaitu terdiri dari pengurus kelompok tani yaitu terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara. Pengurus dipilih melalui musyawarah kelompok yang melibatkan seluruh anggota kelompok dan masa tugas pengurus berlangsung selama dua tahun.

### 3) Sanksi-sanksi

Tabel 16. Distribusi frekuensi mengenai Persepsi responden Berdasarkan penerapan sanksi-sanksi kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng program Swadaya

Persepsi Responden mengenai Penerapan Sanksi-sanksi	Terlaksana		Ragu-ragu		Tdk terlaksana	
	F	%	F	%	F	%
Penerapan Sanksi point a	26	100				
Penerapan Sanksi point b	26	100				
Penerapan Sanksi point c	7	26,92	10	38,46	9	34,61
Penerapan Sanksi point d	26	100				
Penerapan Sanksi point e	26	100				
Penerapan Sanksi point f	26	100				
Penerapan Sanksi point g	26	100				
Penerapan Sanksi point h	26	100				

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2008.

- Ket : Terlaksana = Persepsi Penerapan sanksi KTH dilaksanakan oleh responden  
 Ragu-ragu = Persepsi Responden tidak mengetahui terlaksana atau tidaknya penerapan sanksi dalam KTH  
 Tidak terlaksana = Penerapan sanksi tidak terlaksana menurut persepsi KTH  
 F = Jumlah responden  
 % = Persentase

Tabel 16 menunjukkan bahwa tidak semua penerapan sanksi terlaksana seperti penerapan sanksi pada point c yaitu setiap anggota yang menebang pohon dalam lahannya maupun lahan orang lain untuk dijadikan bahan bangunan/keperluan lain maka hasil tebangan disita oleh kelompok dan

pelakunya dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. 26,92 % anggota kelompok tani mengatakan penerapan sanksi tersebut dilaksanakan, 38,46% yang mengatakan ragu-ragu bahwa penerapan sanksi tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sedangkan 34,61 % yang menyatakan bahwa penerapan sanksi tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan. Hal ini disebabkan masyarakat takut terlibat apabila melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

#### 4) Intensitas pertemuan

Pelaksanaan pertemuan / rapat pada program swadaya kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng pada tahun 2004-2008 dilaksanakan berdasarkan keperluan kelompok tani biasanya dilaksanakan 1 kali dalam sebulan atau dilaksanakan hanya satu kali dalam 3 bulan tergantung dari hal-hal yang ingin dibicarakan. Untuk mengetahui jumlah kelompok tani yang mengikuti rapat pada setiap tahun dapat dilihat pada lampiran 12 dan 13

#### b. Persentase tumbuh

Sampai saat ini usaha swadaya masyarakat sudah memperoleh hasil panen sebanyak 2 kali yakni pada tahun 2007 dan 2008. Adapun rincian persentase tumbuh tanaman pada usaha swadaya masyarakat dapat dilihat pada lampiran 14 dan 15.

Berdasarkan hasil pada lampiran 14 menunjukkan persentase tumbuh tanaman jambu mete kelompok tani sipakainge pada tahun 2007 yaitu 81% sedangkan tahun 2008 memperoleh 80,46%. Untuk persentase tumbuh tanaman kelompok tani Sipatuodeceng pada tahun 2007 yaitu 81,52% sedangkan tahun 2008 persentase tumbuh tanamannya menurun menjadi 81,35 %

Penyebab penurunan persentase tumbuh pada tahun 2008 disebabkan adanya hama penyakit yang menyerang tanaman jambu mete yang ada dilokasi tersebut, kurangnya pemeliharaan tanaman . Keberhasilan tumbuh tanaman juga tergantung pada keadaan tempat tumbuh pada lokasi tanam.

c. Penerimaan kelompok tani Sipakainge dan Sipatuodeceng

Pada lampiran 16 , 17, 18 , dan 19 kita dapat mengetahui penerimaan rata-rata kelompok tani dari hasil penanaman jambu mete. Berdasarkan hasil penelitian maka penerimaan responden dari usaha swadaya jambu mete dapat dihitung dari jumlah produksi x dengan harga produksi jambu mete. Adapun besarnya penerimaan pendapatan pertahun dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 17. Tingkat Penerimaan Pendapatan Responden (Rp/Thn) Usaha Jambu mete Kelompok Tani Sipakainge di Desa Mattirotasi Kecamatan Wattangpulu, Kabupaten Sidrap

No	Penerimaan Pendapatan/Thn	Jumlah Responden		Persentase (%)	
		2007	2008	2007	2008
1	< 8 juta	2	2	18,19	18,19
2	8 juta – 16 juta	8	9	72,73	81,81
3	> 16 juta	1	-	9,08	-
	<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Analisis data Primer, 2009

Tabel 18. Tingkat Pendapatan Responden (Rp/Thn) Usaha Jambu mete Kelompok Tani Sipatuodeceng di Desa Mattirotasi Kecamatan Wattangpulu Kabupaten Sidrap

No	Penerimaan Pendapatan/Thn	Jumlah Responden		Persentase (%)	
		2007	2008	2007	2008
1	< 8 juta	2	2	13,3	13,3
2	8 juta – 16 juta	11	11	73,4	73,4
3	> 16 juta	2	2	13,3	13,3
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Analisis data Primer, 2009

Tabel 17 menunjukkan pada tahun 2007 dan tahun 2008 jumlah responden/kelompok tani Sipakainge yang memperoleh penerimaan pendapatan kurang dari 8 juta sebanyak 2 orang atau 18,19% , responden yang memperoleh

penerimaan pendapatan antara 8 juta - 16 juta pada tahun 2007 sebanyak 8 orang atau 72,73% dan tahun 2008 sebanyak 9 orang atau 81,81% . Sedangkan untuk penerimaan pendapatan diatas 16 juta hanya 1 orang pada tahun 2007.

Tabel 18 menunjukkan pada tahun 2007 dan tahun 2008 jumlah responden/kelompok tani Sipatuodeceng yang memperoleh penerimaan pendapatan kurang dari 8 juta sebanyak 2 orang atau 13,3% , responden yang memperoleh penerimaan pendapatan antara 8 juta-16 juta pada tahun 2007 dan tahun 2008 sebanyak 11 orang atau 73,4% , sedangkan untuk penerimaan pendapatan diatas 16 juta pada tahun 2007 dan tahun 2008 sebanyak 2 orang.

Pendapatan yang tinggi disebabkan karena perbedaan luas lahan, sehingga jumlah tanaman jambu mete yang ditanam lebih banyak dibanding luas lahan yang kecil adanya faktor kesehatan tanaman juga mempengaruhi penerimaan pendapatan kelompok tani.

#### d. Legalitas Lahan

Hutan Kemasyarakatan merupakan peluang legal dari pemerintah yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengelolah kawasan hutan. Dalam pelaksanaannya hutan kemasyarakatan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk hak pengusahaan hutan kemasyarakatan (HPHKM), yakni hak yang diberikan oleh menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat melalui penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Walaupun

secara historis lahan pada program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) dilegalkan untuk mengelolah lahan tersebut berdasarkan SK MenhutBun No.677/Kpts-II/1998. Namun sampai saat ini kelompok tani sipakainge dan Sipatuodeceng belum mendapatkan surat izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Sehingga dari segi legalitas lahan hutan kemasyarakatan untuk usaha swadaya dapat disimpulkan belum adanya kejelasan dari pemerintah setempat apakah lahan tersebut legal, sehingga salah satu hasil dari usaha swadaya masyarakat yaitu berusaha untuk memperoleh legalitas lahan.



## **VI. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Sejarah pengelolaan areal hutan kemasyarakatan diawali dengan diturunkannya SK Menhutbun No.677/Kpts-II/98 yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat disekitar hutan untuk turut mengelola dan mendayagunakan potensi sumberdaya hutan. Salah satu program yang dapat didayagunakan dalam penerapan keputusan menteri tersebut adalah program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund). Rangkaian kegiatan pembuatan hutan kemasyarakatan di laksanakan pada tahun 1999 namun pada tahun 2000 program ini gagal yang disebabkan adanya kebakaran hutan. Setelah mengalami kebakaran, pada tahun 2001 BPDAS (Balai pengelolaan Daerah Aliran Sungai) memberikan bantuan bibit kepada masyarakat namun mengalami kegagalan yang sama pada tahun 2003 yang disebabkan oleh kebakaran. Dari kegagalan tersebut kelompok tani mulai berinisiatif sendiri untuk melakukan usaha sendiri yaitu usaha swadaya jambu mete pada tahun 2004. Akhirnya dalam kurun waktu tiga tahun tanaman jambu tersebut dapat berproduksi dan dapat dirasakan hasilnya.

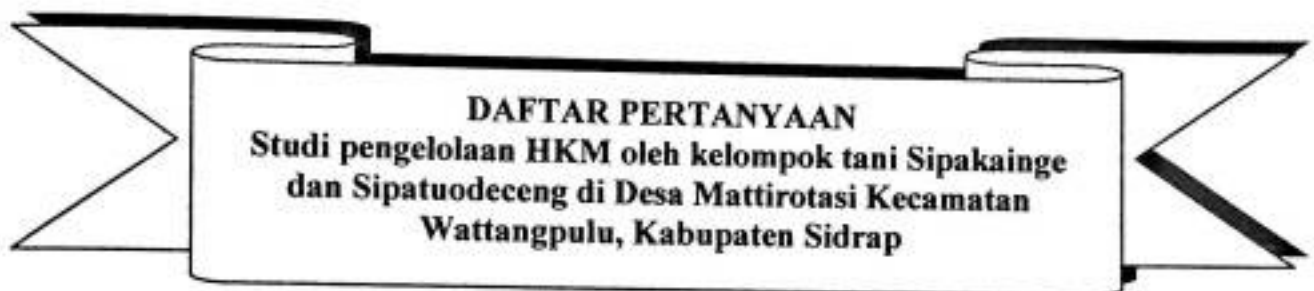
2. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pembagunan hutan kemasyarakatan adalah :
  - 1) Terbentuknya organisasi kelompok tani dari program OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) yang manfaatnya dirasakan sampai sekarang
  - 2) Memperoleh lahan usaha hutan kemasyarakatan, walaupun sampai saat ini belum mendapatkan surat izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan
  - 3) Memberikan tambahan pendapatan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan

### **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka diharapkan adanya penguatan kelompok tani hutan sehingga kelompok tani hutan dapat berjalan lancar seperti dulu lagi.
2. Kegiatan Hutan Kemasyarakatan ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang sering dialami oleh masyarakat di dalam dan sekitar hutan, sekarang dan untuk masa yang datang.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## Lampiran 1.



### A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama	
Jenis Kelamin	Laki/laki/Wanita
Umur (tahun)	
Suku	
Asli/Pendatang	(Asli/Pendatang)
Asal Desa (jika pendatang)	
Alasan Pindah (jika pendatang)	
Lama tinggal di desa (tahun)	
Agama	
Pendidikan (tahun)	
Status dalam Keluarga	
Status Perkawinan	(Kawin/duda/Janda)
Pekerjaan Utama	
Pekerjaan Samping	
Jumlah Anggota Keluarga (jiwa)	
Jumlah Tanggungan Keluarga (jiwa)	
Alamat	
Status ketokohan	Andi/Tetua Adat/Warga biasa
Anggota Kelompok Tani (sebutkan nama kelompok taninya)	
Pendapatan/tahun	

### **Program OECF :**

1. Apakah Bapak tau apa itu Program OECF ? Ya Tidak  
Ya, apa yang bapak ketahui tentang OECF ?
2. Dari mana bapak tau Program OECF ?
  - a. Penyuluh
  - b. Kepala desa
  - c. LSM
  - d. Tokoh masyarakat
  - e.
3. Tanaman Apa saja yang bapak tanam pada program tersebut
4. Berapa jumlah tanaman yang anda tanam ?

### **Program BPDAS**

1. Apakah bapak tau apa itu BPDAS ?
2. Berapa jumlah bibit tanaman yang diberikan oleh BPDAS kepada anda ?
3. Tanaman apa saja yang bapak tanam pada program BPDAS ?
4. Berapa jarak tanam yang digunakan pada waktu penanaman ?

### **USaha Swadaya Tanaman Jambu mete**

1. Berapa luas lahan tanaman jambu mete anda?
2. Berapa jumlah pohon yang terdapat didalamnya?
3. Berapa umur tanaman jambu mete anda?
4. Berapa rata hasil yang diberikan setiap pohonnya atau berapa hasil per hektarnya?
5. Berapa harga jambu mete/biji
6. Berapa jam/hari anda gunakan untuk pembukaan lahan (pembabatan)?
7. Berapa jam/hari anda gunakan untuk pembukaan lahan (pembersihan)?
8. Berapa jam/hari anda gunakan untuk pembukaan lahan (pemagaran)?
9. Berapa jam/hari anda gunakan untuk pengolahan tanah?
10. Berapa jam/hari anda gunakan untuk menanam?

11. Berapa jam/hari anda gunakan untuk memelihara?
12. Berapa jam/hari anda gunakan untuk memanen?
13. Berapa upah yang berlaku di desa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas?
14. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pengeringan dan pemecahan tanaman jambu mete setiap satuan (kg atau liter)? Atau berapa bagi hasilnya seandainya menggunakan sistem bagi hasil?

### **Kelembagaan :**

1. Sebutkan aturan- aturan yang ada dalam lembaga tersebut?
  - a. Larangan keanggotaannya ? Terlaksana      Tidak terlaksana
  - b. Bagaimana hak dan kewajiban keanggotaannya ? Terlaksana    Tdk terlaksana
  - c. Bagaimana kepengurusan kelompok ? Terlaksana    tdk terlaksana
  - d. Bagaimana tugas pengurus :
    - Ketua : Terlaksana    Tdk terlaksana
    - Sekretaris : Terlaksana    Tdk terlaksana
    - Bendahara : Terlaksana Tidak terlaksana
  - e. Bagaimana Sanksi- Sanksinya : Terlaksana    Tidak terlaksana
2. Manfaat-manfaat apa saja yang dapat bapak dapatkan dengan adanya lembaga tersebut ?
3. Berapa kali Rapat dilaksanakan pada program :
  - BPDAS
  - OECF
  - Swadaya
4. Berapa kali bapak mengikuti rapat pada program :
  - OECF
  - BPDAS
  - Swadaya

## Lampiran 2.

Identitas Responden Anggota Kelompok Tani Sipakainge Program OECF dan BPDAS di Desa Mattirotasi, Kecamatan Wattangpulu ,Kabupaten Sidrap.

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendk	Pekerjaan	Tangg. Kelg	Luas Lahan(Ha)
1	Lagempung	42	L	SD	Wiraswasta	3	1
2	Latapa	45	L	-	Petani	5	1
3	Lapatang	47	L	-	Petani	4	1
4	Lakumundu	44	L	-	Petani	5	1
5	Lasaloko	46	L	-	Petani	3	1
6	Lakimang	43	L	-	Petani	4	1
7	Laborodding	39	L	SMP	Petani	3	1
8	Lariping	50	L	SR	Petani	5	1
9	Lomping	55	L	SR	Petani	6	1
10	Latange	39	L	SD	Petani	3	1
11	Lanta	31	L	SMP	Petani	3	1
12	Japar	53	L	SR	Petani	4	1
13	Labeka	63	L	SR	Wiraswasta	6	1
14	Lamasse	46	L	-	Petani	3	1
15	Lati	44	L	-	Petani	4	1
16	Lasennang	27	L	SD	Petani	-	1
17	Labenga	32	L	SMP	Petani	3	1
18	Lapadu	30	L	-	Petani	4	1
19	Pakcopo	67	L	SR	Petani	5	1
20	Latangge I.	53	L	-	Petani	4	1
21	Lakandang	38	L		Petani	5	1
22	Lapoding	35	L		Petani	5	1
23	Laconding	43	L	SD	Petani	4	2
24	H.Asis,BA	55	L	DI	LSM	4	1
25	Lakila	47	L		Petani	3	1
26	Asake'e	41	L		Petani	5	1
27	Mustafa	56	L	SR	Petani	5	1
28	Lapele	31	L	SD	Petani	3	1

### Lampiran 3.

Identitas Responden Anggota Kelompok Tani Sipatuodeceng Program OECF dan BPDAS di Desa Mattirotasi, Kecamatan Wattangpulu, Kabupaten Sidrap.

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendk	Pekerjaan	Tangg. Kelg	Luas Lahan(Ha)
1	Lainring	43	L	SD	Petani	4	1
2	Sardyanto	29	L		Petani	1	1
3	Bahar	40	L		Petani	2	1
4	Agusalim	53	L		Petani	2	1
5	Lapoteng	22	L	SMA	Wiraswasta	1	1
6	M.Tahir	65	L	SR	Petani	5	1
7	Lamada	32	L	SMP	Petani	2	1
8	MadeAli	32	L	SD	Petani	3	1
9	Camma	39	L	SD	Petani	3	1
10	Darmin	37	L	SD	Petani	4	1
11	LaRaupe	29	L	SMP	Wiraswasta	1	1
12	Darma	64	L	SR	Petani	6	1
13	Lamba	53	L	SR	Wiraswasta	6	1
14	Alang	26	L		Petani	3	1
15	Lukman	45	L	SMP	Petani	2	1
16	La Patta	47	L	SD	Petani	4	1
17	Adarue	51	L	SMP	Petani	5	1
18	Rano	40	L		Petani	5	1
19	Ladalle	50	L	SR	Wiraswasta	5	1
20	Bahar K	30	L		Petani	2	1
21	Awi	38	L		Wiraswasta	4	1
22	Tajuddin	41	L	SD	Petani	3	1
23	La Galibe	53	L		Petani	6	2
24	Amir L	32	L	SMP	LSM		1
25	Arsad	41	L	SD	Petani	1	1



#### Lampiran 4.

Identitas Responden Anggota Kelompok Tani Sipakainge Program Swadaya di Desa Mattirotasi, Kecamatan Wattangpulu, Kabupaten Sidrap.

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pend	Pekerjaan	Tang.Kel	Luas Lahan
1	Lagempung	42	L	SD	Wiraswasta	3	1
2	Nursakiah	30	P	SMP	Petani	Lajang	1
3	Isana	29	P	SD	Petani	3	1
4	La Sennang	27	L	SD	Petani	Lajang	1
5	Abd Latif	46	L	SD	Wiraswasta	4	1
6	La Conding	43	L	SD	Petani	4	2
7	H.Bahar	50	L	SD	LSM	4	1
8	Lihi	39	L	SD	Petani	3	1
9	Ardiansyah	23	L	SMA	Petani	1	1
10	Aan	25	L	SMP	Wiraswasta	Lajang	1
11	Bedue'	37	L	SD	Petani	3	2

## Lampiran 5.

Identitas Responden Anggota Kelompok Tani Sipatuodeceng Program Swadaya di Desa Mattirotasi, Kecamatan Wattangpulu, Kabupaten Sidrap.

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pend	Pekerjaan	Tang.Kel	Luas Lahan
1	Baharuddin B	51	L	SD	Petani	3	1
2	H.Bakri	30	L	SD	Wiraswasta	3	1
3	Akkas	24	L	SD	Petani	2	1
4	Udin	30	L	SD	Petani	3	1
5	Kamal	46	L	SD	Wiraswasta	2	1
6	La Pessi	43	L	SD	Petani	2	2
7	La Bara	50	L	SD	Petani	4	2
8	La Bunru	39	L	SMP	Petani	3	1
9	La Kamma	61	L	SR	Petani	5	1
10	Arnianti	25	P	SMP	Wiraswasta	Lajang	1
11	Sudirman	37	L	SMP	Petani	2	1
12	Itati	45	P	SD	Wiraswasta	5	0,5
13	Bakriani	31	L	SD	Petani	3	1
14	Abd.Taufik	33	L	SMA	PNS	3	1
15	La Padu'	62	L		Petani	6	1

**Lampiran 6.**

**Jumlah bibit untuk pembangunan Pilot Project HKM di Desa Mattirotasi**

No	Jenis tanaman	Luas/panjang penanaman	Jarak tanaman	Kebutuhan bibit/benih	Kebutuhan bibit sulaman	Jumlah kebutuhan bibit
1	2	3	4	5	6	7
	Tanaman MPTS					
	1. kemiri	536 ha	5 x 5 m	214.400	42.880	257.280
	2. jambu mente	348 ha	5 x 5 m	139.200	27.840	167.040
	Tanaman batas	4.750 ha	5 m	2.850	570	3.420
		4.750 ha	5 m	2.850	570	3.420
	3.Randu					
	4.Asam/nangka					
	Jumlah			359.350	71.860	431.160
	Tanaman kayu-kayuan					
	1. Jati	116 ha	3 x 2 m			
	2. Caliandra	536 ha	5 x 2,5 m	193.140	38.620	231.760
	3. Lamtoro	348 ha	5 x 2,5 m	428.800	85.760	514.560
				278.400	55.680	334.080
	Tanaman batas	5.125 ha	3 m		2.050	
		5.125 ha	3 m	5.125	2.050	7.175
	4. eucalyptus			5.125		7.175
	5. mahoni					
	Jumlah			910.590	184.160	1.094.750
	Total kebutuhan bibit			1.269.890	256.020	1.525.910
	Tanaman semusim					
	1.jagung	132 ha	1 m x 40 cm	3.960 kg		3.960 kg
	2.kacang tanah	132 ha	20 x 30 cm	6.600 kg		6.600 kg
	3.kedelai/wijen	132 ha	30 x 15 cm	7.920 kg		7.920 kg

Sumber : Rancangan Teknis,1999

## Lampiran 7.

Jumlah Rapat yang diikuti oleh Kelompok tani Sipakainge Program OECF

No	Nama	Jumlah Rapat yang diikuti (1 tahun)		
		Mc	WasLaiDal	LSM
1	Lagempung	12	12	11
2	Latapa	12	12	12
3	Lapatang	12	12	12
4	Lakumundu	12	12	12
5	Lasaloko	12	12	12
6	Lakimang	12	12	12
7	Laborodding	12	12	12
8	Lariping	12	12	12
9	Lomping	12	11	12
10	Latange	12	12	12
11	Lanta	12	12	12
12	Japar	12	12	12
13	Labeka	12	12	12
14	Lamasse	12	12	12
15	Lati	12	12	12
16	Lasennang	11	12	10
17	Labenga	12	12	12
18	Lapadu	12	12	12
19	Pakcopo	11	12	12
20	Latangge I.	12	12	12
21	Lakandang	12	12	12
22	Lapoding	12	11	12
23	Laconding	12	12	11
24	H.Asis,BA	10	12	12
25	Lakila	12	12	12
26	Asake'e	12	12	12
27	Mustafa	12	12	12
28	Lapele	12	12	11

Data Primer Setelah diolah, 2008

## Lampiran 8

Jumlah Rapat yang diikuti Kel.tani Sipatuodeceng Program OECF

No	Nama	Jumlah Rapat yang diikuti (1 tahun)		
		MC	WasLaidal	LSM
1	Lainring	12	12	11
2	Sardyanto	12	12	10
3	Bahar	12	12	12
4	Agusalim	12	12	12
5	Lapoteng	12	12	12
6	M.Tahir	12	12	11
7	Lamada	12	11	12
8	MadeAli	12	12	11
9	Camma	11	12	11
10	Darmin	12	12	12
11	LaRaupe	12	12	12
12	Darma	12	12	12
13	Lamba	12	12	12
14	Alang	11	12	12
15	Lukman	11	12	12
16	La Patta	12	12	12
17	Adarue	12	12	12
18	Rano	12	12	12
19	Ladalle	12	12	11
20	Bahar K	11	12	12
21	Awi	12	11	12
22	Tajuddin	12	11	12
23	La Galibe	12	12	10
24	Amir L	12	12	11
25	Arsad	12	11	12

Data Primer Setelah diolah, 2008

## Lampiran 9.

### Jumlah Tanaman Yang Ditanam Anggota Kelompok Tani Sipakainge Program BPDAS Sebelum Terjadi Kebakaran

Nama	Jumlah tanaman yang ditanam							Luas lahan
	A	B	C	D	E	F	G	
Lainring	400	400		250	250	100	100	1
Sardyanto		400	400	250	250	100	100	1
Bahar	400	400		250	250	100	100	1
Agusalim		400		250	250	100	100	1
Lapoteng	400	400		250	250	100	100	1
M.Tahir	400	400		250	250	100	100	1
Lamada		400	400	250	250	100	100	1
MadeAli	400	400		250	250	100	100	1
Camma		400	400	250	250	100	100	1
Darmin	400	400		250	250	100	100	1
LaRaupe	400	400		250	250	100	100	1
Darma	400	400		250	250	100	100	1
Lamba		400	400	250	250	100	100	1
Alang	400	400		250	250	100	100	1
Lukman	400	400		250	250	100	100	1
La Patta		400	400	250	250	100	100	1
Adarue	400	400		250	250	100	100	1
Rano	400	400		250	250	100	100	1
Ladalle		400	400	250	250	100	100	1
Bahar K	400	400		250	250	100	100	1
Awi	400	400		250	250	100	100	1
Tajuddin	400	400		250	250	100	100	1
La Galibe		400	400	250	250	100	100	1
Amir L	400	400		250	250	100	100	1
Arsad	400	400		250	250	100	100	1

Sumber: Informasi Responden

Ket : A : Jambumete                      D : Gmelina    G: Pinang  
       B : Jatilokal                        E : Mahoni  
       C : Kemiri                            F : Kapuk

## Lampiran 10

### Jumlah Tanaman Yang Ditanam Anggota Kelompok Tani Sipatuodeceng Program BPDAS Sebelum Terjadi Kebakaran

Nama	Jumlah tanaman yang ditanam							Luas lahan
	A	B	C	D	E	F	G	
Lagempung		400	400	250	250	100	100	1
Latapa	400	400		250	250	100	100	1
Lapatang		400	400	250	250	100	100	1
Lakumundu	400	400		250	250	100	100	1
Lasaloko		400	400	250	250	100	100	1
Lakimang		400	400	250	250	100	100	1
Laborodding	400	400		250	250	100	100	1
Lariping		400	400	250	250	100	100	1
Lomping	400	400		250	250	100	100	1
Latange		400	400	250	250	100	100	1
Lanta		400	400	250	250	100	100	1
Japar		400	400	250	250	100	100	1
Labeka	400	400		250	250	100	100	1
Lamasse		400	400	250	250	100	100	1
Lati		400	400	250	250	100	100	1
Lasennang	400	400		250	250	100	100	1
Labenga		400	400	250	250	100	100	1
Lapadu		400	400	250	250	100	100	1
Pakcopo	400	400		250	250	100	100	1
Latangge I.		400	400	250	250	100	100	1
Lakandang		400	400	250	250	100	100	1
Lapoding		400	400	250	250	100	100	1
Laconding	400	400		250	250	100	100	1
H.Asis,BA		400	400	250	250	100	100	1
Lakila	400	400		250	250	100	100	1
Asake'e		400	400	250	250	100	100	1
Mustafa		400	400	250	250	100	100	1
Lapele	400	400		250	250	100	100	1

Sumber: Informasi Responden

Ket : A : Jambumete      D : Gmelina      G: Pinang  
 B : Jatilokal      E : Mahoni  
 C : Kemiri      F : Kapuk

## Lampiran 11

Jumlah Rapat yang Diikuti Kelompok Tani Sipakainge Program BPDAS

No	Nama	Jmlh rpt yg diikuti		
		2001	2002	2003
1	Lagempung	5	4	3
2	Latapa	5	4	3
3	Lapatang	5	4	3
4	Lakumundu	5	4	3
5	Lasaloko	5	4	3
6	Lakimang	5	4	4
7	Laborodding	5	4	3
8	Lariping	5	4	4
9	Lomping	5	4	4
10	Latange	5	4	3
11	Lanta	5	4	3
12	Japar	5	4	4
13	Labeka	5	4	3
14	Lamasse	5	4	4
15	Lati	5	4	3
16	Lasennang	5	4	2
17	Labenga	5	4	1
18	Lapadu	5	4	2
19	Pakcopo	5	4	3
20	Latangge I.	5	4	4
21	Lakandang	5	4	3
22	Lapoding	5	4	2
23	Laconding	5	4	4
24	H.Asis,BA	5	4	2
25	Lakila	5	4	1
26	Asake'e	5	4	2
27	Mustafa	5	4	1
28	Lapele	5	4	1

Sumber : Data Primer yang telah diolah,2009



Jumlah Rapat yang Diikuti Kelompok Tani Sipatuodeceng Program BPDAS

No	Nama	Jmlh rpt yg diikuti		
		2001	2002	2003
1	Lainring	5	3	4
2	Sardyanto	5	4	3
3	Bahar	5	3	4
4	Agusalim	5	4	2
5	Lapoteng	5	4	1
6	M.Tahir	5	4	4
7	Lamada	5	4	3
8	MadeAli	5	4	4
9	Camma	5	3	4
10	Darmin	5	4	3
11	LaRaupe	5	4	3
12	Darma	5	4	4
13	Lamba	5	2	3
14	Alang	5	4	4
15	Lukman	5	4	3
16	La Patta	5	1	2
17	Adarue	5	4	4
18	Rano	5	4	2
19	Ladalle	5	4	4
20	Bahar K	5	4	4
21	Awi	5	4	3
22	Tajuddin	5	3	1
23	La Galibe	5	4	4
24	Amir L	5	4	2
25	Arsad	5	1	2

**Lampiran 12.**

**Jumlah Rapat yang diikuti Kelompok Tani Sipakainge Program Swadaya**

<b>No</b>	<b>Nama KTH</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Rapat</b>				
		<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
1	Lagempung	3	3	2	3	5
2	Nursakiah	3	2	2	2	3
3	Isana	3	2	2	2	4
4	La Sennang	2	2	3	3	5
5	Abd Latif	1	2	2	3	5
6	La Conding	3	3	2	3	3
7	H.Bahar	3	3	2	2	2
8	Lihi	3	3	3	1	3
9	Ardiansyah	3	3	2	2	4
10	Aan	3	2	3	1	4
11	Bedue'	3	3	2	3	5

Data Primer Setelah diolah, 2009

### Lampiran 13

Jumlah Rapat yang diikuti Kelompok Tani Sipatuodeceng Program Swadaya

No	Nama KTH	Jumlah Pelaksanaan Rapat				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Baharuddin B	3	3	3	3	5
2	H.Bakri	2	3	3	2	5
3	Akkas	3	2	2	2	3
4	Udin	3	2	2	3	5
5	Kamal	2	3	2	2	3
6	La Pessi	3	3	2	3	5
7	La Bara	1	2	2	2	4
8	La Bunru	3	3	3	1	3
9	La Kamma	3	1	2	2	5
10	Armianti	2	2	3	1	5
11	Sudirman	3	3	2	3	3
12	Itati	3	2	2	2	5
13	Bakriani	3	1	-	-	-
14	Abd.Taufik	3	1	-	-	-
15	La Padu'	3	2	-	-	-

Data Primer Setelah diolah, 2009

## Lampiran 14

Jumlah Tanaman yang Ditanam Kel.Tani Sipakainge Program Swadaya

No	Nama	Luas areal	Jarak tanam	jmlh tnmn yg ditanam	Jmlh tnmn yg hidup tahun 09	jmlh tnmn yg hdp thn 08	Persentase tumbuh (%)	
							Thn 07	Thn 08
1	Lagempung	1	7m x 7m	200	169	169	84,5	84,5
2	Nursakiah	1	7m x 7m	200	160	160	80	80
3	Isana	1	7m x 7m	200	161	161	80,5	80,5
4	H.Bahar	1	7m x 7m	200	165	165	82,5	82,5
5	Lasennang	1	7m x 7m	200	155	155	77,5	77,5
6	Abd.Latif	1	7m x 7m	200	165	164	82,5	82
7	Laconding	2	7m x 7m	400	320	318	80	79,5
8	Lihl	1	7m x 7m	200	166	161	80,5	80,5
9	Ardiansya	1	7m x 7m	200	168	166	84	83
10	Aan	1	7m x 7m	200	159	158	79,5	76
11	Bedue	2	7m x 7m	400	318	315	78,75	79,5
<b>Jumlah</b>				<b>2600</b>	<b>2106</b>	<b>2092</b>	<b>81</b>	<b>80,46</b>

## Lampiran 15

Jumlah Tanaman Yang Ditanam Kel.Tani Sipatuodeceng Program Swadaya

No	Nama	Luas areal	Jarak tanam	jmlh tnmn yg dtanam	Jmlh tnmn yg hidup tahun 07	jmlh tnm yg hdp thn 08	Persentase tumbuh (%)	
							Thn 07	Thn 08
1	Baharuddin	1	7m x 7m	200	166	166	83	83
2	H.Bakri	1	7m x 7m	200	164	163	82	81,5
3	Akkas	1	7m x 7m	200	161	161	80,5	80,5
4	Udin	1	7m x 7m	200	165	165	82,5	82,5
5	Kamal	1	7m x 7m	200	169	169	84,5	84,5
6	Lapessi	2	7m x 7m	400	323	322	80,75	80,5
7	Labara	2	7m x 7m	400	320	320	80	80
8	Labunru	1	7m x 7m	200	165	165	82,5	82,5
9	Lakamma	1	7m x 7m	200	155	155	77,5	77,5
10	Arnianti	1	7m x 7m	200	165	164	82,5	82
11	Sudirman	1	7m x 7m	200	162	162	81	81
12	Itati	1	7m x 7m	200	168	166	84	83
13	Bakriani	1	7m x 7m	200	159	158	79,5	76
14	Abdul Rauf	1	7m x 7m	200	161	161	80,5	80,5
15	Lapadu	1	7m x 7m	200	169	169	84,5	84,5
<b>Jumlah</b>				<b>3400</b>	<b>2772</b>	<b>2766</b>	<b>81,52</b>	<b>81,35</b>

## Lampiran 16

Penerimaan Petani Hasil Usaha Swadaya Jambu Mete Kel.Tani Sipakainge Tahun 2007

Rumus Penerimaan = Jumlah satuan hasil produksi x harga satuan

Ket : Harga biji jambu mete Rp.50/biji  
Dalam 1 Pohon menghasilkan ± 1000 biji

1. Lagempung =  $169.000 \times 50 = \text{Rp.}8.450.000$
2. Nursakiah =  $160.000 \times 50 = \text{Rp.}8.000.000$
3. Isana =  $161.000 \times 50 = \text{Rp.}8.050.000$
4. H.Bahar =  $165.000 \times 50 = \text{Rp.}8.250.000$
5. Lasennang =  $155.000 \times 50 = \text{Rp.}7.750.000$
6. Abd.latif =  $165.000 \times 50 = \text{Rp.}8.250.000$
7. Laconding =  $320.000 \times 50 = \text{Rp.}16.000.000$
8. Lihi =  $166.000 \times 50 = \text{Rp.}8.300.000$
9. Ardiansyah =  $168.000 \times 50 = \text{Rp.}8.400.000$
10. Aan =  $159.000 \times 50 = \text{Rp.}7.950.000$
11. Bedue =  $318.000 \times 50 = \text{Rp.}15.900.000$

## Lampiran 17

Penerimaan Petani Hasil Usaha Swadaya Jambu Mete Kel.Tani Sipakainge Tahun 2008

Rumus Penerimaan = Jumlah satuan hasil produksi x harga satuan

Ket : Harga biji jambu mete Rp.50/biji  
Dalam 1 Pohon menghasilkan ± 1000 biji

1. Lagempung =  $169.000 \times 50 = \text{Rp.}8.450.000$
2. Nursakiah =  $160.000 \times 50 = \text{Rp.}8.000.000$
3. Isana =  $161.000 \times 50 = \text{Rp.}8.050.000$
4. H.Bahar =  $165.000 \times 50 = \text{Rp.}8.250.000$
5. Lasennang =  $155.000 \times 50 = \text{Rp.}7.750.000$
6. Abd.latif =  $164.000 \times 50 = \text{Rp.}8.200.000$
7. Laconding =  $318.000 \times 50 = \text{Rp.}15.900.000$
8. Lihi =  $161.000 \times 50 = \text{Rp.}8.050.000$
9. Ardiansyah =  $168.000 \times 50 = \text{Rp.}8.400.000$
10. Aan =  $158.000 \times 50 = \text{Rp.}7.900.000$
11. Bedue =  $315.000 \times 50 = \text{Rp.}15.750.000$

## Lampiran 18

Penerimaan Petani Hasil Usaha Swadaya Jambu Mete Kel.Tani Sipatuodeceng  
Tahun 2007

Rumus Penerimaan = Jumlah satuan hasil produksi x harga satuan

Ket : Harga biji jambu mete Rp.50/biji  
Dalam 1 Pohon menghasilkan  $\pm$  1000 biji

1. Baharuddin =  $166.000 \times 50 = \text{Rp.}8.300.000$
2. H.Bakri =  $164.000 \times 50 = \text{Rp.}8.200.000$
3. Akkas =  $161.000 \times 50 = \text{Rp.}8.050.000$
4. Udin =  $165.000 \times 50 = \text{Rp.}8.250.000$
5. Kamal =  $169.000 \times 50 = \text{Rp.}8.450.000$
6. Lapessi =  $323.000 \times 50 = \text{Rp.}16.150.000$
7. Labara =  $320.000 \times 50 = \text{Rp.}16.000.000$
8. Labunru =  $165.000 \times 50 = \text{Rp.}8.250.000$
9. Lakamma =  $155.000 \times 50 = \text{Rp.}7.750.000$
10. Arnianti =  $165.000 \times 50 = \text{Rp.}8.250.000$
11. Sudirman =  $162.000 \times 50 = \text{Rp.}8.100.000$
12. Itati =  $168.000 \times 50 = \text{Rp.}8.400.000$
13. Bakriani =  $159.000 \times 50 = \text{Rp.}7.950.000$
14. Abd.Rauf =  $161.000 \times 50 = \text{Rp.}8.050.000$
15. Lapadu =  $169.000 \times 50 = \text{Rp.}8.450.000$



## Lampiran 19

Penerimaan Petani Hasil Usaha Swadaya Jambu Mete Kel.Tani Sipatuodeceng Tahun 2008.

Rumus Penerimaan = Jumlah satuan hasil produksi x harga satuan

Ket : Harga biji jambu mete Rp.50/biji  
Dalam 1 Pohon menghasilkan ± 1000 biji

1. Baharuddin =  $166.000 \times 50 = \text{Rp.}8.300.000$
2. H.Bakri =  $163.000 \times 50 = \text{Rp.}8.150.000$
3. Akkas =  $161.000 \times 50 = \text{Rp.}8.050.000$
4. Udin =  $165.000 \times 50 = \text{Rp.}8.250.000$
5. Kamal =  $169.000 \times 50 = \text{Rp.}8.450.000$
6. Lapessi =  $322.000 \times 50 = \text{Rp.}16.100.000$
7. Labara =  $320.000 \times 50 = \text{Rp.}16.000.000$
8. Labunru =  $165.000 \times 50 = \text{Rp.}8.250.000$
9. Lakamma =  $155.000 \times 50 = \text{Rp.}7.750.000$
10. Arnianti =  $164.000 \times 50 = \text{Rp.}8.200.000$
11. Sudirman =  $162.000 \times 50 = \text{Rp.}8.100.000$
12. Itati =  $166.000 \times 50 = \text{Rp.}8.300.000$
13. Bakriani =  $158.000 \times 50 = \text{Rp.}7.900.000$
14. Abd.Rauf =  $161.000 \times 50 = \text{Rp.}8.050.000$
15. Lapadu =  $169.000 \times 50 = \text{Rp.}8.450.000$

Lampiran 20.

Foto- Foto Kegiatan



